

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1501, 2021

KEMEN.INVEST-BKPM. Penggunaan. DAK Nonfisik. Fasilitasi. Penanaman Modal. Tahun Anggaran 2022. Petunjuk Teknis.

# PERATURAN MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;

# Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

- 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
- 13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi
  Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
  Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- 2. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitasi

- penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 6. Risiko adalah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 7. Tahun Anggaran 2022 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- 8. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
- 9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal.
- 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal.

# BAB II KEGIATAN DAK NONFISIK

# Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 terdiri atas kegiatan:
  - a. pengawasan Penanaman Modal;
  - b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;
  - c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
  - d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP provinsi.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan upaya memastikan pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi Penanaman Modal dan/atau pelaksanaan kewajiban kemitraan yang dilaksanakan terhadap kegiatan usaha berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui inspeksi lapangan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- (4) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
- b. inspeksi lapangan; dan
- c. evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.
- (5)Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha, melalui pemeriksaan administratif/fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban kemitraan dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

# Pasal 4

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko; dan
  - b. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring) melalui rapat/pertemuan dengan narasumber yang kompeten.

- (1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara luring dan/atau daring melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten.
- (2) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
- b. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

# Pasal 6

- (1) Penyusunan bahan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berupa penyediaan video promosi digital sebagai bahan promosi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan barang/jasa.
- (3) Penyediaan video promosi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
  - a. proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal; dan
  - b. testimoni Pelaku Usaha.

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Besaran nilai alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 yang diterima setiap tahunnya dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator, yaitu:
  - a. nilai realisasi Penanaman Modal akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. kapasitas fiskal daerah; dan
  - d. kondisi aksesibilitas geografis.

- (3) Nilai realisasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan nilai realisasi Penanaman Modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (4) Jumlah Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di daerah provinsi dan kabupaten/kota selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, yaitu:
  - a. sangat rendah;
  - b. rendah;
  - c. sedang;
  - d. tinggi; dan
  - e. sangat tinggi.
- (6) Kondisi aksesibilitas geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. sulit;
  - b. sedang; dan
  - c. mudah.

# BAB III

# **PENGELOLAAN**

# Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. menu kegiatan;
  - b. target kegiatan; dan
  - c. rincian alokasi per jenis kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melakukan penganggaran sebagaimana dimaksud huruf Pemerintah dalam Pasal 8 b, Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang mengacu pada rincian alokasi Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan rincian alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dengan mengacu pada rincian APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sesuai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
  - a. menu kegiatan dan target kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian; dan

b. rincian alokasi per jenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas setiap daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
   dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIDAK).
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
  - a. realisasi kegiatan;
  - b. realisasi penyerapan anggaran; dan
  - c. permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap:
  - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - b. realisasi kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
  - realisasi penyerapan anggaran DAK Nonfisik
     Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022;
     dan
  - d. permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik (2)Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian dalam hal ini unit deputi yang menyelenggarakan bidang urusan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputi yang

menyelenggarakan urusan bidang promosi Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

# Pasal 14

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.

# BAB IV PEMBINAAN

# Pasal 15

- (1) Kementerian sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota pengelola DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, koordinasi, serta pendidikan dan pelatihan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

# BAHLIL LAHADALIA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara nasional, Penanaman Modal sangat berperan penting dalam memutar roda perekonomian nasional. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas Penanaman Modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian menetapkan dua arah kebijakan, yaitu peningkatan inovasi untuk pencapaian target Penanaman Modal dan peningkatan Penanaman Modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian menjalankan beberapa fungsi antara lain pelaksanaan promosi melalui koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi, pengembangan dan fasilitasi promosi dalam negeri dan fungsi

pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal melalui pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal, pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, bimbingan teknis dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan Penanaman Modal. Kementerian juga melakukan penguatan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota melalui penyaluran DAK Nonfisik.

Dalam pelaksanaan fungsi Penanaman Modal pada satuan kerja perangkat daerah, terdapat gap fiskal antara kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah dan pembiayaan untuk kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di DPMPTSP provinsi, kabupaten, dan kota yang mengakibatkan kurang optimalnya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal di daerah, terutama untuk pengawasan realisasi Penanaman Modal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menindaklajuti hal tersebut, pada awal Tahun 2020, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk menganggarkan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dimulai pada Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya pada RAPBN Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan anggaran sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) untuk DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis Pemerintah untuk sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

# B. Arah Kebijakan

Pencapaian target realisasi Penanaman Modal melalui kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal.

#### C. Tujuan

- Meningkatkan capaian realisasi Penanaman Modal di provinsi dan kabupaten/kota;
- Meningkatkan kepatuhan Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Meningkatkan pemahaman Pelaku Usaha mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- Meningkatkan minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

#### D. Sasaran

Sasaran kegiatan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal adalah:

- Meningkatnya realisasi Penanaman Modal dari semula Rp858.500.000.000.000,000 (delapan ratus lima puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) pada Tahun 2021 menjadi Rp968.400.000.000.000,000 (sembilan ratus enam puluh delapan triliun empat ratus miliar rupiah) pada Tahun 2022, sesuai penyesuaian dari target dalam RPJMN 2020-2024;
- Meningkatnya jumlah Pelaku Usaha yang memiliki Perizinan Berusaha;
- Meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan Penanaman Modal di masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota sebesar 20% dari Tahun 2021;
- Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- Meningkatnya minat penanam modal untuk melakukan Penanaman Modal di daerah.

# E. Ruang Lingkup

Lingkup Wilayah

DAK Nonfisik dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota.

- 2. Lingkup Kegiatan/Menu Kegiatan
  - a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, melalui:
    - analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;

- inspeksi lapangan; dan
- evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha.

Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal dilakukan sesuai dengan Peraturan BKPM mengenai pedoman dan tata cara pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;

- b. Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal, meliputi:
  - bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko.
  - bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi:
    - i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
    - ii. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
    - iii. pembatalan sertifikat standar atau izin;
    - iv. pencabutan Perizinan Berusaha;
    - v. pengaduan;
    - vi. pengenaan sanksi administratif; dan
    - vii. profil Pelaku Usaha.
  - DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota melakukan survei pemanfaatan kegiatan kepada Pelaku Usaha dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Anak Lampiran I).
- c. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, dengan tahapan yang meliputi:
  - identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya yang dituangkan dalam profil Pelaku Usaha yang dilakukan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (Anak Lampiran II);

- penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, yang dilakukan secara luring dan/atau daring, melalui rapat/pertemuan antara Pelaku Usaha, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah terkait atau narasumber yang kompeten; dan
- evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dalam bentuk notula rapat yang disampaikan kepada pihak terkait (Anak Lampiran III).
- d. Kegiatan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal di daerah provinsi merupakan kegiatan penyediaan video promosi digital dengan kualitas video minimum 1080 HD, durasi video minimum 4 (empat) menit, dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Video promosi digital akan menampilkan testimoni dari Pelaku Usaha dan mempromosikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) proyek yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan di wilayah Provinsi.

Pemilihan proyek yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan tersebut dilakukan berdasarkan hasil identifikasi yang telah disusun oleh DPMPTSP provinsi berdasarkan usulan dari DPMPTSP kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut (Anak lampiran IV).

Identifikasi proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal unggulan dilakukan oleh DPMPTSP provinsi sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga.

Penyediaan video promosi digital sebagai bahan promosi Penanaman Modal dilakukan dengan proses sebagai berikut:

- pra produksi, merupakan kegiatan persiapan antara lain meliputi:
  - a) rapat koordinasi penetapan hasil identifikasi potensi Penanaman Modal unggulan yang akan ditampilkan dalam video promosi digital;
  - b) pembuatan storyline;
  - pembuatan storyboard;

- d) penentuan lokasi;
- e) pemilihan talent;
- f) pemilihan Pelaku Usaha yang akan memberikan testimoni;
- g) pemilihan elemen audio dan visual; dan
- h) pemilihan Video Editing Tools.
- produksi, merupakan proses creative di lapangan antara lain meliputi:
  - a) shooting (pengambilan gambar testimoni Pelaku Usaha); dan
  - b) pengambilan gambar di lapangan dan pengumpulan video.
- pascaproduksi, merupakan proses creative editing dan finishing antara lain:
  - a) editing video;
  - b) motion graphic;
  - music compose and mixing;
  - d) voice over talent; dan
  - e) subtitle.

DPMPTSP provinsi membuat Laporan Triwulan Kegiatan Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal di Daerah (Anak Lampiran V).

- e. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal kepada Pelaku Usaha, dilakukan kegiatan pendampingan yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dengan kriteria:
  - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
  - tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
  - c) memiliki dan memahami perangkat komputer;
  - d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
  - e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan

- f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah atau kepala DPMPTSP provinsi maupun kabupaten/kota.
- f. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara bertugas:
  - a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS, yang meliputi subsistem pelayanan informasi, subsistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko, dan subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko;

Subsistem pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko meliputi:

- i. pengawasan rutin dan pengawasan insidental;
- ii. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- iii. pembatalan sertifikat standar atau izin;
- iv. pencabutan Perizinan Berusaha;
- v. pengaduan;
- vi. pengenaan sanksi administratif; dan
- vii. profil Pelaku Usaha.
- b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha; dan
- c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP (Anak Lampiran VI).

### F. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Nonfisik terdiri atas:

- a. Kegiatan pengawasan Penanaman Modal, meliputi:
  - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada Sistem OSS (Anak Lampiran VII);
  - LKPM melalui Sistem OSS bagi Pelaku Usaha kecil, menengah, dan besar (Anak Lampiran VIII);
  - 3. penilaian kepatuhan Pelaku Usaha melalui Sistem OSS; dan
  - pemutakhiran profil Pelaku Usaha, melalui Sistem OSS.

Dalam hal poin 1, poin 3, dan poin 4 belum dapat dilakukan melalui Sistem OSS, maka hasil kegiatan pengawasan Penanaman Modal dilakukan tanpa melalui Sistem OSS.

- Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Laporan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha memuat informasi antara lain:
  - 1. peserta dan presensi;
  - narasumber;
  - 3. materi yang disampaikan;
  - notula kegiatan;
  - hasil survei pelaksanaan kegiatan; dan
  - dokumentasi.
- c. Kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya memuat informasi antara lain:
  - peserta dan presensi;
  - narasumber;
  - materi yang berisi profil Pelaku Usaha dan kronologis permasalahan;
  - notula kegiatan;
  - 5. LKPM; dan
  - dokumentasi.
- d. Kegiatan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal, output berupa video promosi digital, memuat informasi antara lain:
  - proyek Penanaman Modal yang siap ditawarkan dan/atau potensi Penanaman Modal; dan
  - testimoni Pelaku Usaha.

# G. Kebijakan Operasional

- Gubernur wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi:
  - a) pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal; dan

- b) promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan
   DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk menumbuhkan minat berinvestasi.
- Bupati/walikota wajib memprioritaskan unit yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal dan kepatuhan Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal.
- Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan DAK Nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan DAK Nonfisik sesuai dengan Target output Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk Pengelolaan DAK Nonfisik yang telah ditetapkan Kementerian (Anak Lampiran IX).
- Dalam hal target output kegiatan pada angka 4 telah tercapai, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat melakukan perubahan/pergeseran rincian alokasi DAK Nonfisik sesuai alokasi setiap daerah yang telah ditetapkan.
- 6. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib berpedoman pada menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis Peraturan Menteri ini.
- Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.
- Kepala DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran kegiatan DAK Nonfisik.
- Kepala DPMPTSP provinsi menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal sebagai pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.

- DPMPTSP kabupaten/kota menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
- Menteri menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik.

# H. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip:

#### keterpaduan

Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap kelompok jabatan fungsional berdasarkan struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

#### efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

#### efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

# 4. akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN

#### A. Perencanaan

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dibuat perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota, prioritas program untuk pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Anak Lampiran X) yang dituangkan dalam RKA pada SIPD sesuai dengan menu kegiatan dan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima;
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, dituangkan dalam Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal (Anak Lampiran XI).
- f. Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal disampaikan oleh DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota kepada Kementerian dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik paling lambat tanggal 01 Maret 2022.

#### B. Pengelolaan Anggaran

- 1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:
  - a. pengawasan Penanaman Modal meliputi:
    - analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari Pelaku Usaha, yang terdiri dari:
      - a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan
      - b) penggandaan bahan.
    - inspeksi lapangan, yang terdiri dari:
      - a) uang harian untuk pelaksana;
      - b) biaya penginapan/hotel untuk pelaksana;
      - biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan; dan
      - d) biaya swab antigen.
         Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan
    - evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha sebagai berikut:
      - a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan
      - b) penggandaan bahan.

regional.

- b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha berupa:
  - bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang terdiri dari:
    - a) konsumsi rapat (makan dan snack);
    - paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative;
    - uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator, dan narasumber);
    - d) penginapan (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber);

- e) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
- honorarium narasumber dan pembawa acara;
- g) honorarium moderator;
- h) penggandaan bahan dan seminar kit;
- spanduk dan backdrop;
- j) pengadaaan lisensi video conference selama 1 tahun;
- upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan; dan
- l) biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin g diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko
  - a) konsumsi rapat (makan dan snack);
  - b) paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative;
  - uang saku/uang harian (panitia, pembawa acara, moderator dan narasumber).
  - d) uang transportasi (panitia, pembawa acara, moderator, narasumber, dan peserta), khusus panitia biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
  - e) honorarium narasumber dan pembawa acara;
  - f) honorarium moderator;
  - g) spanduk dan backdrop;

- h) penggandaan bahan dan seminar kit; dan
- i) biaya swab antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin f diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya meliputi:
  - identifikasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
    - a) konsumsi rapat (makan dan snack);
    - uang harian ke lokasi proyek untuk pengumpulan informasi dalam kegiatan identifikasi permasalahan dan hambatan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha;
    - c) biaya penginapan/hotel;
    - d) biaya transportasi kabupaten/kota ke lokasi proyek/transportasi lokal/sewa kendaraan/biaya BBM untuk kendaraan yang digunakan;
    - e) penggandaan bahan; dan
    - biaya Swab Antigen.

Terkait poin a sampai dengan poin d diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.

- penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi
   Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
  - paket meeting fullday/halfday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia, dan narasumber). Jika tidak tersedia hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah atau tempat lain yang representative;
  - uang saku (panitia dan narasumber);
  - c) honor narasumber;
  - d) penggandaan bahan; dan

- e) biaya Swab Antigen.
- Terkait poin a, poin b, dan poin c diberikan mengikuti standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
- evaluasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya sebagai berikut:
  - a) konsumsi rapat (makan dan snack); dan
  - b) penggandaan bahan.
- d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal dengan menggunakan belanja jasa lainnya.
- 2. Ketentuan honorarium narasumber adalah:
  - Non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk tenaga pendamping;
  - b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online; atau
  - c) Profesional atau praktisi langsung yang memiliki kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yang cukup terkait Penanaman Modal, Perizinan Berusaha berbasis Risiko melalui Sistem OSS, maupun tata cara pengisian LKPM Online.
- 3. Ketentuan honorarium moderator adalah:
  - ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dan Kementerian, yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi; atau
  - Profesional atau praktisi yang memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.
- Ketentuan upah atau gaji bulanan tenaga pendamping Non ASN, dibayarkan untuk 1 (satu) orang selama 12 (dua belas) bulan yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di daerah.
- DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan,

pengadaan kendaraan, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas untuk koordinasi ke pusat, serta pengadaan sarana dan prasarana.

#### C. Pelaporan

- DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan DAK Nonfisik (Anak Lampiran XII) kepada Menteri dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui aplikasi SIDAK secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 20 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 20 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi:
  - realisasi penyerapan anggaran;
  - b. realisasi kegiatan; dan
  - permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
- Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh Kementerian dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan kementerian/lembaga terkait. Objek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

# E. Ketentuan Pembiayaan

- 1. Perjalanan dinas untuk:
  - a) DPMPTSP provinsi dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya; dan
  - b) DPMPTSP kabupaten/kota hanya dapat dilaksanakan di kabupaten/kota dalam wilayahnya (tidak dapat lintas kabupaten/kota).
- Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen ataupun kegiatan di luar ruang lingkup DAK Nonfisik ini,

- maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.
- Untuk mendukung pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, bagi kegiatan yang belum dapat dianggarkan menggunakan DAK Nonfisik ini maka DPMPTSP menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan lainnya.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan promosi Penanaman Modal di provinsi, kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan pengawasan Penanaman Modal, bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya dan penyusunan bahan promosi Penanaman Modal. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran di luar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahunnya.

Kepala DPMPTSP provinsi dan kepala DPMPTSP kabupaten/kota dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai jumlah target output minimal sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENT'ERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

Panduan Pengisian:

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN

MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# FORMAT SURVEI PEMANFAATAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis di masa mendatang, maka kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi kuisioner ini dengan sungguh-sungguh.

Kura	ang : 1-5	5										
Cuk	up : 6											
Baik	: 7											
Baik	Sekali : 8											
Men	nuaskan : 9-1	0										
Nam	ıa	:_										
Peru	ısahaan	ž										
Kegi	atan Bimtek											
coercin*	ggal Kegiatan Pencapaian h											
	Kurang Memuas <mark>k</mark> an	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan
2. 5	Sistematika p	enya	ajian	par	arar	17	E.	87 8	ă.	10.5	75	Tie 1
- 8	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan
3. I	Penguasaan n	nate	ri?	37	7.7	Tre .	E.	87 -	Ž.	15.	75	Tie 1
- 3	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan

4.	Kemampuan p	oeny	/ajia	n/pe	nya	mpai	an r	nate	ri?			****
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan
5.	Kesesuaian ar	ntar	a ma	iteri	yang	g dis	amp	aika	n de	ngan	baha	an ajar?
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan
6.	Kehadiran dai	n ke	tepa	tan	wakt	u se	suai	jady	val?			
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	ő	7	8	9	10	Memuaskan
7.	Penggunaan n	neto	de d	an r	nedia	a per	nbel	ajara	an?			-
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	Memuaskan
8.	Daya simpati,	gay	a, si	kap	dan	peri	laku	terh	ada	p pes	erta	)
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	Memuaskan
9.	Pemberian ke	sem	pata	n ta	nya j	awa	b?			X=	de:	8
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	Memuaskan
10	. Kemampua	an n	nenja	wab	per	tanya	aan?	1	0	Y=	di:	8
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	Memuaskan
11	Kemampua mengajar?	an r	nenc	ipta	kan	daya	tari	k da	n me	otiva	si da	lam belajar
	Kurang Memuaskan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Memuaskan
12	Saran:											L, N

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DILAKUKAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

Periode Laporan: Bulan..... Tahun 2022

Nama Pelaku Usaha	(2)				
NIB	120				
Lokasi Proyek	\$				
Nama dan Kontak					
Bidang Usaha	1				
Nilai Rencana Investasi	1				
Realisasi Investasi	\$50 \$50				
Tenaga Kerja	:				
Luas Area	1				
Rencana Produksi	2				
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi	ı	300			
Kegiatan Rapat	Tanggal Pelaksanaan :				
	Narasumber 1.	1			
	Narasumber 2.	:			
Hasil Kegiatan I	: (Uraian)	166			
Kegiatan Rapat II (bila perlu)	Tanggal Pelaksaaan	Ł			
jan day	Narasumber 1.	:			
	Narasumber 2.	1:			
Hasil Kegiatan II	: (Uraian)				
Hasil Akhir	*				
Status Permasalahan	: Selesai/Tidak Selesai				
Dokumentasi	*				

# PETUNJUK PENGISIAN

# PROFIL PELAKU USAHA PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Nama Pelaku Usaha diisi dengan nama Pelaku Usaha sesuai akta perusahaan.
(2)	NIB diisi dengan nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
(3)	Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan email.
(4)	Nama dan Kontak Perusahaan diisi dengan keterangan penanggung jawab Perusahaan yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor handphone.
(5)	Bidang Usaha diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
(6)	Nilai Rencana Investasi diisi dengan nilai rencana investasi.
(7)	Realisasi Investasi diisi dengan total akumulasi realisasi investasi sampai saat ini.
(8)	Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki- laki dan perempuan serta tenaga kerja asing di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
(9)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(10)	Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.
(11)	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
(12)	Kegiatan Rapat I, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat I.
(13)	Hasil Kegiatan I diisi dengan uraian hasil pelaksanaan kegiatan rapat pertama, yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.

No	URAIAN ISIAN
(14)	Kegiatan Rapat II, diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan rapat dan nama, jabatan narasumber yang diundang saat rapat kedua.
(15)	Hasil Kegiatan II diisi dengan hasil pelaksanaan kegiatan rapat II yang terdiri atas keputusan rapat, atau kesepakatan para pihak.
(16)	Hasil Akhir Penyelesaian Masalah diisi dengan hasil keputusan rapat.
(17)	Status permasalahan diisi apakah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha dimaksud setelah kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya menjadi selesai atau tidak selesai.
(18)	Dokumentasi diisi dengan foto, dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ANAK LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN

MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# FORMAT NOTULA RAPAT

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

Hari/Tanggal	: (1)	
Waktu	: (2)	
Tempat	: (3)	
Pimpinan Rapat	: (4)	
Agenda Rapat	: (5)	
Hasil pembahasai	n sebagai berikut: (6)	
1		
2		
Dst		
Tindak lanjut seb	agai berikut: (7)	
1		
2		
Dst		
Demikian, rapat i	ni dihadiri oleh: (8)	

No.	Instansi	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
16		*	4
-	:	28	43
-	,	<del> </del>	10

#### PETUNJUK PENGISIAN NOTULA RAPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

No	URAIAN ISIAN			
(1)	Hari/Tanggal diisi dengan hari/tanggal pelaksanaan rapat.			
(2)	Waktu diisi dengan jam pelaksanaan rapat.			
(3)	Tempat diisi dengan lokasi pelaksanaan rapat.			
(4)	Pimpinan Rapat diisi dengan pejabat yang memimpin rapat.			
(5)	Agenda Rapat diisi dengan topik pembahasan rapat.			
(6)	Hasil pembahasan diisi dengan penjelasan uraian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya serta usulan penyelesaian dari masing-masing peserta rapat.			
(7)	Tindak lanjut diisi dengan langkah-langkah penyelesaiar permasalahan.			
(8)	Masing-masing peserta rapat menandatangani notula rapat penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.			

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANAK LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

#### IDENTIFIKASI PROYEK/POTENSI PENANAMAN MODAL

Provinsi: (1	)
--------------	---

(A)	(B)	(C)		(D)	(E)
No	Kabupaten /Kota	Identifikasi Proyek	Bentuk Informasi Proyek		Keterangan
		Penanaman Modal	IPRO	Potensi	- Meneraligan
1	Kab. xx	1)	*		6:
		2)	*		8
2	Kota xx	1)			e e
	2	2)	*		
dst.	6	70.		ï	

### PETUNJUK PENGISIAN IDENTIFIKASI PROYEK/POTENSI PENANAMAN MODAL

No.	URAIAN	
(1)	Diisi dengan nama provinsi.	
(A)	Nomor urut.	
(B)	Nama kabupaten/kota.	
(C)	Diisi dengan maksimal dua (2) nama proyek Penanaman Modal unggulan atau potensi Penanaman Modal unggulan yang siap ditawarkan yang ada di kabupaten/kota.	
(D)	<ul> <li>Memilih (mengisi dengan tanda √) salah satu bentuk informasi tentang peluang nama proyek/potensi Penanaman Modal pada kolom:</li> <li>a. IPRO: Investment Project Ready to Offer, berupa proyek yang siap ditawarkan dengan dilengkapi hal-hal terkait detil proyek yang dihasilkan melalui proses kajian (minimal Pra-Feasibility Study).</li> <li>b. Potensi adalah hasil dari analisis telaahan dasar berisi</li> </ul>	
(E)	tentang beberapa informasi dasar dari rencana proyek.  Informasi tambahan yang diperlukan untuk dijelaskan lebih lanjut. Misalnya apabila sebuah proyek masih dalam proses IPRO namun belum final.	

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANAK LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

### FORMAT LAPORAN TRIWULAN KEGIATAN PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DI DAERAH

No	Proses Kegiatan	Periode Pela	aksanaan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Proses Pengadaan Barang/Jasa		1100	
1.	Pra Produksi meliputi:  a. Rapat koordinasi penetapan hasil identifikasi potensi Penanaman Modal unggulan yang akan ditampilkan dalam video promosi digital  b. Pembuatan Storyline c. Pembuatan Storyboard d. Penentuan lokasi e. Pemilihan talent f. Pemilihan Pelaku Usaha yang akan memberikan testimoni g. Pemilihan Elemen Audio dan Visual h. Pemilihan Video Editing Tools			
2.	Produksi meliputi:  a. Shooting (Pengambilan gambar testimoni Pelaku Usaha)  b. Pengambilan Gambar di lapangan dan pengumpulan video			
3.	PascaProduksi meliputi:  a. Editing Video  b. Motion graphic  c. Music Compose dan Mixing  d. Voice over talent  e. Subtitle			

#### PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	URAIAN	
(1)	Diisi dengan Nomor urut.	
(2)	Telah jelas/diuraikan.	
(3)	Diisi dengan Waktu saat mulainya/kegiatan/pekerjaan.	
(4)	Diisi dengan Waktu berakhirnya kegiatan/pekerjaan.	
(5)	Diisi dengan keterangan berupa penjelasan atas pelaksanaan proses kegiatan, kendala yang dialami selama proses pengerjaan serta hal-hal lain yang dianggap belum maksimal dalam proses pengerjaan kegiatan tersebut.	

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

F

Nomor

Ξ

# ANAK LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

INDONESIA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

NOMOR 8 TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TENTANG

NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT LAPORAN BULANAN TENAGA PENDAMPING NON APARATUR SIPIL NEGARA

Kegiatan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengoperasian Sistem OSS Tanggal 12 (perseorangan/non Nama Pelaku Usaha Nama Pelapor Ŧ Nomor HP Ū Permasalahan 0 Tindakan Pendampinagn (bimbingan, konsultasi, asistensi, diseminasi) 3

Kegiatan diseminasi informasi terkait penggunaan Sistem OSS pada kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

F

Nomor

	3		
(11)	(10)	(9)	(8)
Tema Diseminasi	Jumlah peserta	Tempat Pelaksanaan	nggal Pelaksanaan

(Tanda tangan dan stempel) 4.5 Mengetahui, Tenaga Pendamping Non ASN ...04

www.peraturan.go.id

#### PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN			
(1)	Nomor urut.			
(2)	Tanggal pelaporan dari Pelaku Usaha.			
(3)	Nama Pelaku Usaha (PT, CV, Perorangan) yang melaporkan.			
(4)	Nama orang yang melaporkan.			
(5)	Nomor Handphone orang yang melaporkan.			
(6)	Penjelasan atas permasalahan yang dilaporkan.			
(7)	Jenis tindakan pendampingan yang dilakukan.			
(8)	Tanggal pelaksanaan kegiatan bimtek.			
(9)	Tempat pelaksanaan kegiatan bimtek.			
(10)	Jumlah peserta (Pelaku Usaha) kegiatan bimtek.			
(11)	Tema/materi yang disampaikan oleh tenaga pendamping ketika bimtek			
(12)	Diisi tempat dibuatnya laporan.			
(13)	Diisi tanggal dibuatnya laporan.			
(14)	Diisi nama jabatan.			
(15)	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.			
(16)	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.			

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANAK LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA

ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI

PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

	FORMAT BERITA ACAF	RA PEMERIKSAAN
	BERITA ACARA PEMI	ERIKSAAN (BAP)
	Nomor:	*******
a ha	ıri ini, tanggal l	bulan tahun
g be	rtanda tangan di bawah ini, wakil-w	vakil dari instansi pemerintah dan wa
i pe ko:	rusahaan, telah melakukan Peng	gawasan Perizinan Berusaha Berba
	ERANGAN PERUSAHAAN	
1.	Nama Pelaku Usaha/ perusahaan	
2.	Alamat Lokasi Proyek	
	Nama dan Kontak Penanggung	
3.	jawab di lokasi proyek	
3. PER	TO CONTRACT CONTRACTOR TO CONTRACTOR	RISIKO YANG MENJADI OBY
PER	IZINAN BERUSAHA BERBASIS GAWASAN Nomor dan Tanggal Penerbitan	RISIKO YANG MENJADI OBY
PER PEN	IZINAN BERUSAHA BERBASIS GAWASAN Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	RISIKO YANG MENJADI OBY
PER PEN 1.	IZINAN BERUSAHA BERBASIS GAWASAN Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha Nomor Kode Proyek	RISIKO YANG MENJADI OBY
1. 2. 3.	IZINAN BERUSAHA BERBASIS GAWASAN  Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha  Nomor Kode Proyek  Kegiatan Usaha	RISIKO YANG MENJADI OBY
2. 3. 4.	IZINAN BERUSAHA BERBASIS GAWASAN  Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha  Nomor Kode Proyek  Kegiatan Usaha  Bidang Usaha  Persyaratan dasar Perizinan	RISIKO YANG MENJADI OBY

8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	ab
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: b. Sertifikasi: c. Lisensi: d. Pendaftaran Barang:
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	e. lain-lain:  a. Nilai Rencana Investasi:  b. Nilai Realisasi Investasi:
		c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan: orang Total: orang
12.	Kewajiban *)	Divestasi Pelatihan TKI CSR Kemitraan Alih Teknologi Pengelolaan Lingkungan
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: b. Administratif:
	MASALAHAN YANG DIHADAPI PEI	RUSAHAAN
DOK	UMEN PENDUKUNG	
REI	KOMENDASI	

Mengetahui Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan		Pemeriksa,	Tanda Tangan
	1	Koordinator	
		BKPM/DPMPTSP	
		Provinsi/DPMPTSP	
		Kabupaten/Kota/Administrator	
		KEK dan Badan Pengusahaan	
		KPBPB *)	
Cap dan Tanda Tangan		Nama :	
		Jabatan :	
Nama		Oabatan :	-
Jabatan	2	BKPM/DPMPTSP	
	70	Provinsi/DPMPTSP	
		Kabupaten/Kota	
		Nama :	
		Jabatan :	
	3	Kementerian/Lembaga	
		Provinsi/DPMPTSP	
		Kabupaten/Kota	
		Nama:	32
		Jabatan :	
	4	Wakil Instansi	
	- 25	Nama :	
		Jabatan :	
		TO CONTRACTOR TO	
		Dan seterusnya sesuai	
		kebutuhan	

#### TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

#### PENOMORAN BAP: dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

#### KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan Kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

#### II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1,	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha*)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - Penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki : orang Perempuan : orang

		Total : orang				
12.	Kewajiban	Divestasi				
		Pelatihan TKI				
	(disi dengan:	CSR				
	centang (√): memenuhi	Kemitraan				
	silang (x): tidak	Alih Teknologi				
	memenuhi)	Pengelolaan Lingkungan				
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis:  **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan  ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  b. Administratif:  **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan				

<sup>\*)</sup> sesuai dengan kegiatan usaha

#### III. PERMASALAHAN

Diisi tentang semua hambatan/kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.

#### IV. HASIL PENGAWASAN

- Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masingmasing K/L/D.
- Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapatditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.

#### V. DOKUMEN PENDUKUNG

Pelaksana pengawasan dari masing-masing K/L/D, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa file pdf.

#### VI. REKOMENDASI

- Telah memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- Pembinaan termasuk dalam penyelesaian permasalahan perusahaan;
- Perbaikan; atau
- Penerapan sanksi.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

ANAK LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL

## LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL

#### TAHUN: ...

#### PERIODE:

- Semester Pertama (Januari Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli Desember) : ( )

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	‡:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		
3.	Perizinan Berusaha	1	No.
		1	Perubahan ke
4.	Kegiatan Usaha		(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	Ď	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	D:	

#### II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

0000	Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1		Company of the Compan
1	>	
4	*	
	: :	Realisasi Periode Sebelumnya  : : :

<sup>\*)</sup> Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen).

#### Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

PENG	GUNA	٨N	TENAC	A KER	JA					
Ke	aga rja ahaan	æ	kerja p	enaga eriode imnya	tena	nbahan ga kerja eriode aporan	tena	gurangan aga kerja eriode laporan	Total ten kerja sar dengan pe pelapor	npai riode
Indon	esia				8	- 8			2	
Laki-l	aki	*	Ora	ng	0	rang	13.25	. Orang	Orang	
Perempuan		#	Ora	ng	O	Orang		. Orang	Orang	
Juml	ah	*	Ora	ng	O	rang	320	. Orang	Orang	
(5 %)	Je	nis			1	EMASAF	Ka	pasitas Pr	US THE REAL PROPERTY.	250.2
No.	Bar	ang	250	Sat	uan	Kapasi Sesuai	0.00	Realisas Produks	3 6336	
*)Han	a diin	pu	idu 	triwula		4 tahun I PERUS	Ž.			

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...

Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,

Nama Jelas : Jabatan No. Telepon : Email

#### TATA CARA PENGISIAN

#### LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

#### UNTUK PELAKU USAHA KECIL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui website http://oss.go.id.

#### PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	38	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	#	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	*	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	**************************************	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	#	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	#	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	1	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

#### II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

#### A. Investasi

- Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
  - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
  - Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
- Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
  - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.

- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
- d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail item yang terealisasikan.

#### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
- 2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
- Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, poin 3, dan poin 4.

#### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

Kolom Jenis Barang/Jasa:
 Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

#### 2. Satuan:

Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

#### 3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

#### 4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja per tahun.

#### 5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

#### Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

#### LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

#### TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN

#### TAHUN:

#### PERIODE:

	Triwulan Pertama (Januari - Maret)	: (	1
	Triwulan Kedua (April - Juni)	: (	)
-	Triwulan Ketiga (Juli - September)	: (	1
	Triwulan Keempat (Oktober - Desember)	: (	)

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	1	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)		
3.	Nomor Kode Proyek	1	
4.	Perizinan Berusaha	1	
5.	Kegiatan Usaha		(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha		(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	**	
8.	Alamat Kantor	:	

#### II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			8
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	4		
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	1	(subjumlah otomatis 1-2)	(subjumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	-		2
(2). Pembelian luar negeri	1		
d. Lain-lain	1		Ĭ.
Sub jumlah	-		

2. Modal Kerja (untuk 1 turnover)	1		
Total Jumlah Realisasi	4	8	

#### Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

#### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA\*)

Tenaga Kerja Perusahaan	ti	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia	8 13			8	
- Laki-Laki	Ŧ	Orang	Orang	Orang	Orang
- Perempuan		Orang	Orang	Orang	Orang
Asing	1	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah		Orang	Orang	Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah

#### IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20... Direksi / Kuasa Direksi, Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas : Jabatan : No. Telepon : Email :

<sup>...</sup> orang

<sup>\*)</sup> Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

#### TATA CARA PENGISIAN

#### LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

#### TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN

#### UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website http://oss.go.id.

#### PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
 Usaha/Perusahaan

Nomor Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Berusaha (NIB)

Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
 Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

#### II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal): Investasi

- Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
  - Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
  - Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.

- 3) Komponen realisasi terdiri dari:
  - Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
  - d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu tumover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

#### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

- Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
- Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
- TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
- Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.

- Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, poin 5, dan poin 6.
- Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

#### IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

C. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

## LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

TAHUN ...

PE	RI	O	D	E	:

-	- Triwulan Pertama (Januari – M	aret) :	(	)
-	- Triwulan Kedua (April – Juni)	:	(	)
	- Triwulan Ketiga (Juli – Septemb	er) :	(	)
_	- Triwulan Keempat (Oktober - D	esember) :	1	)

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	346	r = :
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	1	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha		No Tanggal
	8		Perubahan ke
5.	Kelompok Kegiatan Usaha		(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

#### II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode <mark>P</mark> elaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	Į t	0	
2. Modal Kerja		0	8
Jumlah		8	

<sup>\*)</sup> Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.

#### Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

#### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA\*)

Tenaga Kerja Perusahaan	***	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	‡s.	Orang	Orang	Orang	Orang
- Perempuan	‡-	Orang	Orang	Orang	Orang
Asing	T.C	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah	I.	Orang	Orang	Orang	Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah

#### IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN\*)

2 (3)	Jenis		Kapasitas	Produksi	
No	Barang/ Jasa	Satuan	Kapasitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

#### V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	4	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	E	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM		a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Pelaku Usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) 2)
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan TKA*)		Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA:     1)     2)      b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)      c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)		a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp

<sup>...</sup> orang

<sup>\*)</sup> Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

<sup>\*)</sup> Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

			<ul> <li>d. Output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.</li> </ul>
6.	Kewajiban	1	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *)
	Pengelolaan lingkungan		b. Sarana IPAL berupa sebanyak Unit
7.	Lain - lain		

<sup>\*)</sup> Pilih salah satu

#### VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

di cara	

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...

Direksi/Kuasa Direksi

Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas

Jabatan :

No. Telepon

Email

## TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <a href="http://oss.go.id.">http://oss.go.id.</a>

#### PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

#### I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
	Usaha/Perusahaan		
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	‡	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
3.	Nomor Proyek	1	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4.	Perizinan Berusaha	\$3	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5.	Kegiatan Usaha	1	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8.	Alamat Kantor	4	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

#### I. REALISASI PENANAMAN MODAL

- Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
- Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- 3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
  - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (land clearing, cut and fill, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
- Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya overhead perusahaan.

Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

#### II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
- Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
- TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
- Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
- Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
- Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

#### III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

Kolom Jenis Barang/Jasa:

Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.

2. Satuan:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

3. Kolom Kapasitas Izin:

Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.

4. Kolom Kapasitas Produksi:

Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja per tahun.

5. Realisasi produksi:

Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).

Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.

Kolom Nilai Ekspor:

Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor.

#### IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

#### Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

#### Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

#### Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta output dan outcome yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

#### 6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

#### 7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu email aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

No.

Nama Daerah

E

Provinsi Aceh

Rendah (3)

Kabupaten Aceh E Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh

Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh

Tinggi Rendah

Sedang

Mudah

#### Kategori Realisasi Investasi Rendah Sedang Ŧ Klasifikasi Kategori Sangat Rendah Rendah (5) Kategori Aksesibilitas Geografis Mudah Mudah Mudah Sedang Mudah 6 PENGELOLAAN DAK NONFISIK TAHUN ANGGARAN 2022 (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha 3 3 13 16 14 Pengawasan Penanaman Modal 08 Target Minimal Output Kegiatan 236 249 206 316 Bimbingan Teknis Pelaku Usaha 202 Output (Pelaku Usaha) 19 Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal 200.000,000 Alokasi Provinsi 100 Output (Video Promosi Digital)

DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal

865.117.000 383.914.000 393.394.000

(12)

355,476,000

402.873,000 360,216,000

## ANAK LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

NOMOR 8 TAHUN 2021

TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK

FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

No	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Target Minimal O Pengawasan Bim Penanaman Tekni Modal U	nimal Output Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	ahan Promosi an Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	Modal
Ξ	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(01)	(11)	(12)
6	Kabupaten Aceh Tenggara	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	204			383.914.000
7	Kabupaten Aceh Timur	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	7	13	212	*		
Š.	The state of the s	300000000000000000000000000000000000000	77	Rendah							369,695,000
00	Kabupaten Aceh Utam	Sedang	Sedang	Tinggi	Mudah	8	15	232	*	***	355,476,000
9	Kabupaten Bireuen	Rendah	Sedang	Tinggi	Mudah	8	14	225	55	*	341.257.000
10	Kabupaten Pidie	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223			374.435.000
11	Kabupaten Simeulue	Sedang	Rendah	Sangat	Mus	7	12	197			402.873.000
12	Kota Banda Aceh	Sedang	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	232		1	393,394,000
Ç0	Kota Sabang	Rendah	Rendah	Sangat	HIR	2	12	161			388.654.000
4	Kota Langsa	Rendah	Sedang	Sangat	dabuM	7	13	212		30	369.695,000
15	Kota Lhokseumawe	Rendah	iggair	Sangat	dabuM	00	14	221			388,654,000
16	Kabupaten Gayo Lues	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	797	81		369,695,000
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	Rendah	Sedang	Sangat	qepny	2	13	212	24.		369,695,000
18	Kabupaten Aceh Jaya	Rendah	Rendah	Sangat	Mudah	7	13	206	- E		355.476,000
19	Kabupaten Nagan Raya	Tinggi	Rendah	Sangat	Mudah	8	14	221			388.654.000
20	Kabupaten Aceh Tamiang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	7	13	212			369,695,000
21	Kabupaten Bener Meriah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	206	100		355,476,000
22	Kabupaten Pidie Jaya	Rendah	Rendah	Sedang	Mudah	00	14	215	+:	*	336,517,000
23	Kota Subulussalam	Rendah	Rendah	Sangat	Mudah	7	13	206	19		355.476,000

Klasifikasi Kategori attegori attegori attegori kategori kategori kategori kategori kategori kategori kategori kategori kategori Akse sibilitas saha (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	9 × 9× × 9	Penyelesaian Peng dan Hambatan Peng dan Hambatan Peng dan Hambatan Peng Geografis Pelaku Usaha Dejaku Usaha bagi Usaha bagi Pelaku Usaha) Peng Usaha Usaha Usaha Usaha) Peng Usaha Usaha Usaha Usaha Dajaku Usa
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha) (7) 11	Penyelesaian Peng Permasalahan Peng Ian Hambatan M Pelaku Usaha Or (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha) Pelak (7) 17
Target Minimal Or engawasan Bimb enanaman Teknis Modal Us Output (Regintan Saha bagi laku Usaha) (Pelaku Usaha) 371		
Target Minimal Output Kegis engawasan Bimbingan benanaman Teknis Pelaku Modal Usaha Output (Registan Output Jaha Usaha) (8) (9) (9) (245)	relaku a ha (Usaha)	Penyusunan Ba Penanama Alokasi Provinsi (10) 200.000.000
Target Minimal Output Kegi engawasan engawasan enanaman Teknis Pelaku Modal Output (Regiatan Jaaha bagi laku Usaha) (8) 371 245 210 210	singan Pelaku Penyusunan Bahan Promos Pelaku Penanaman Modal Alokasi Usaha) Provinsi Output (Video Promosi Digital) 200.000.000	yusunan Bahan Promos Penanaman Modal Penanaman Modal (Video revinsi (Video Promosi Digital) (10) (11)

No.	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesajan Permasajahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Target Minimal O Pengawasan Bim Penanaman Tekni Modal U	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	ahan Promosi an Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Aloka si Provinsi	Output (Video Promosi Digital)	Modal
Ξ	(2)	(3)	4	(5)	(6)	(2)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	Kota Sibolga	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210			345,997,000
90	Kota Tanjung Balai	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	7	13	212	S. S.		369.695.000
19	Kota Tebing Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	10		393,394,000
20	Kota Padang	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	7	13	212			369,695,000
21	Kabupaten Pakpak	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	7	12	197	8		255,943,000
	Bharat	0	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	Rendah							Section 1
22	Kabupaten Nias Selatan	Rendah	Rendah	Rendah	Sulff	2	12	195		*	379.175.000
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Bumpas	2.	2.1	210	25		398,133,000
24	Kabupaten Serdang Bedagai	Tinggi	iggail	Rendah	HabuM	8	51	240			412,352,000
25	Kabupaten Samosir	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	7	13	212			369.695,000
26	Kabupaten Batu Bara	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232		r	393,394,000
27	Kabupaten Padang Lawas	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	219			379,175,000
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	210		. *	398,133,000
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Rendah	Sedang	Rendah	Bedang	2.	2.13	208	24.		374,435,000
30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	3	208	,19	(4)	374.435.000
31	Kabupaten Nias Utara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Seding	7	12	197			369.695.000
32	Kabupaten Nias Barat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sullt	7	12	191	25		388.654,000
Č2 G2	Kota Gunungsitoli	Rendah	Rendah	Sangat	Mudah	7	13	206			355.476.000

9	17		13	-	14	13	12	11	10	9	00	7	6	C/I	4	3	2		ш	Ξ		No.	
	Kabupaten Pasaman Barat	Kota Pariaman	Kota Sdok		Kota Sawahlunto	Kota Payakumbuh	Kota Padang	Kota Padang Panjang	Kota Bukit Tinggi	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Sjunjung	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pasaman	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten Agam	Kabupaten Lima Puluh Kota	Provinsi Sumatera Barat	(2)		Na ma Daerah	
Rendah	Sedang	Rendah	Kendan		Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	(3)	Kategori Realisasi Investasi		
Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang		Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	(4)	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Klasifik	
Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	(5)	Kategori Kapasitas Finkal	Klasifikasi Kategori	
Mudah	Mudah	Mudah	Mudah		Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Sedang	Mudah	Sedang	Mudah	Mudah	Sult	Mudah	Mudah	Mudah	(6)	Kategori Aksesibilitas Geografis		
8	30	7	,		7	7	9	7	80	8	CO.	8	co	8	8	7	œ	7	10	(7)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	
14	15	13	13		13	13	16	13	14	14	14	14	14	14	15	12	14	13	15	(8)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Target M
217	232	210	212		212	210	249	206	217	217	225	219	219	217	232	191	227	212	329	(9)	Output (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Target Minimal Output Keglatan
*					3		28	**	33	10			125	14		. 10		16	200.000.000	(10)	Alokasi Provinsi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	iatan
91	8 6	r	× 5				,		972	(6)	3			1	18		*		1	(11)	Output (Video Promosi Digital)	ahan Promosi an Modal	
360.216,000	393,394,000	345.997.000	369,695,000		369.695,000	345,997,000	393,394,000	355,476,000	360.216.000	360.216,000	374.435,000	383,914.000	379.175.000	360.216.000	393.394.000	388.654.000	364.955.000	369,695,000	820.752.000	(12)	Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi	

							Target M	Target Minimal Output Kegiatan	iatan	
No	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bi mbingan Teknis Pelak Usaha	bingan is Pelaku saha	gan blaku Penyusunan Bahan Promosi a Penanaman Modal
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usa	utput cu Usaha)	at Alokasi saha) Provinsi
3	(2)	(3)	<b>(4)</b>	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
19	Kabupaten Solok	Sedang	Rendah	Sangat	Mudah	7	13	212		
IV	Provinsi Riau	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	16	345		200.000.000
	Kabupaten Bengkalis	Tinggi	Tinggi	Sangat	tims	88	15	238		
15	Kabupaten Indragiri Hüir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	HINS	8	15	234		10
3	Kabupaten Indragiri Hulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	1.5	245		18
4	Kabupaten Kampar	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249		
Ú)	Kabupaten Kuantan Singingi	Sedang	Sedang	Sedang	Hudah	00	14	227		(4.0
6	Kabupaten Pelalawan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	249		4
7	Kabupaten Rokan Hilir	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sulft	8	14	225		
00	Kabupaten Rokan Hulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245		
9	Kabupaten Siak	Tinggi	Tagget	Tinggi	Mudah	10	19	292		
10	Kota Dumai	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	15	245		
11	Kota Pekanbaru	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16	253		
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rendah	Sedang	Sedang	Sulf	7	23	206		3.0
V	Provinsi Jambi	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	9	14	313		200.000.000
1	Kabupaten Batanghari	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236		-
2	Kabupaten Bungo	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223		-
ω	Kabupaten Kerinci	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	227		1
4	Kabupaten Merangin	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	208		31
OI.	Kabupaten Muaro Jambi	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	236		90
6	Kabupaten Sarolangun	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	217		+
-	Kabupaten Tanjung	Sedang	Rendah	Sedang	Mudah	8	14	221		

ž			Klasifii	Klasifikasi Kategori	-		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	Penyelemian Peng Permasalahan Peng dan Hambatan M	Penyelesaian Pengawasan Bimb dan Hambatan Modal Usa	Penyelessian Pengawasan Permasalahan Pengawasan dan Hambatan Modal
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	755	2	2	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output Output (Kegiatan (Kegiatan Usaha bagi Usaha bagi Pelaku Usaha)
Ξ	(2)	(3)	(A)	(5)	(6)		(7)	- 10	- 10	- 10
00	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	~1		13		13
9	Kabupaten Tebo	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	90		14	14 217	
10	Kota Jambi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	00	200	15	923	923
11	Kota Sungai Penuh	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7		13	13 206	
IA	Provinsi Sumatera Selatan	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	Sec. 10	16	16 345	823
and .	Kabupaten Lahat	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8		15	15 236	
10	Kabupaten Musi Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	50		15	15 240	
Ca	Kabupaten Musi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	00		15.	15 232	
4	Kabupaten Muara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Mudah	00		110	15 240	
OI.	Kabupaten Ogan Komering flir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedung	00		15	15 232	
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	7	0 -0	13	13 212	2 3
7	Kota Palembang	Tinggi	Tinggi	Sangat	Sedang	9		15	15 245	
00	Kota Prabumulih	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	68		14	14 217	024
9	Kota Pagar Alam	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7		13	13 210	
10	Kota Lubuk Linggau	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	On.		14	14 227	
11	Kabupaten Banyuasin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	30		15	15 240	
12	Kabupaten Ogan Ilir	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	OD.	0.00	15	500	500
1.3	Kabupaten OKU Timur	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	60		14		
14	Kabupaten OKU Selatan	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	OS		14	14 221	8
15	Kabupaten Empat Lawang	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	~1		13	13 210	

			Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan	Target M Pengawasan Pengawasan	Target Minimal Output Kegiatan awasan Bimbingan maman Teknis Pelaku Pen	146	han Promosi	DAK Nonfisik
No.	Nama Daerah					Pelaku Usaha	Modal	Usaha			Penanaman
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi	Output (Kegiatan Usaha bagi	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi	Modal
3	(2)	(3)	4	(5)	(6)	(7)	60	(9)	(10)	(11)	(12)
16	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Rendah	Rendah	Tinggi	Mudah	50	14	219			327.038,000
17	Kabupaten Musi Rawas Utara	Tinggi	Rendah	Sedang	Mudah	90	14	230	160	*	369.695,000
νп	Provinsi Bengkulu	Sedang	Rendah	Sangat	Mudah	9	14	316	200.000.000	1	865.117.000
-	Kabupaten Benglodu Selatan	Sedang	Sources	Tinggi	Sedang	90	-	223		٠	369,695,000
12	Kabupaten Bengkulu Utara	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	227		8	398.133.000
w	Kabupaten Rejang Lebong	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	00	14	215			388.654.000
4	Kota Bengkulu	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	6	25	245			402.873.0
ćņ.	Kabupaten Kaur	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	208	1	,	374.435.000
6	Kabupaten Seluma	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	15	232	200		393,394,000
7	Kabupaten Mukomuko	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Sedung	7	13	210			398,133,000
00	Kabupaten Lebong	Tinggi	Rendah	Sangat	Sedang	7	13	212			402,873,000
9	Kabupaten Kepahiang	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	7	13	212			369,695,000
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rendah	Rendah	Sangat	Mudah	2	13	206	2.	7	355,476,000
VIII	Provinsi Lampung	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	10	15	339	200.000.000	1	854.026.000
pak	Kabupaten Lampung Barat	Rendah	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	210			345,997,000
10	Kabupaten Lampung Selatan	Tinggi	iggnil	Sedang	Mudah	9	15	245			402.873.000
Cu	Kabupaten Lampung Tengah	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	00	15	236			383,914,000
4	Kabupaten Lampung Utara	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	223	t		374.435.000

	12	3	ts H K	6 K	7 K	8 K	8.0	10 K	11 K	12 K	5000	14 K	15 K	IX P	X	1 K	2 K		3 K	8	- 90
		(2)	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Way Kanan	2400	Kota Metro	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten Mesuji	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten Pesisir Barat	nsi DKI Jakarta	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bundung	Kabupaten Bekasi	Kabupaten Bogor	Kabupaten Ciamis	Kabupaten Cianjur	
	Kategori Realisa si Investasi	(3)	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	
Klasifik	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	(1)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Inggi	tggail.	iggnil.	Sedang	Tinggi	
Klasifikasi Kategori	Kategori Kapasitas Fiskal	(5)	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat	Sedang	Sangat	Sangat	Rendah	Sangat	Sangat Tinggi	Sangat	Sangat	Sangat	Sedang	Sangat	* A. C. Opt. Day *
	Kategori Aksesibilitas Geografis	(6)	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Sedang	Mudah	Sedang	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	
Penyelesaian Permasalahan	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	(7)	SO.	00	8	8	9	8	7	20	7	7	7	12	12	9	6	9	66	9	
Pengawa san Penanaman	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	(8)	15	14	14	14	16	14	13	14	13	S	13	18	18	16	16	16	14	16	
awasan Bimbingan Pen	Output (Pelaku Usaha)	(9)	232	217	223	223	253	217	212	221	212	206	202	384	384	258	258	258	225	258	
Penyusunan Bahan Promosi	Alokasi Provinsi	(10)		263			3. S			**				200,000,000	200.000.000	*				100	
than Promosi	Output (Video Promosi Digital)	(11)					3 3			5				1	1	2 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			*		
DAK Nonfisik	Modal	(12)	355,476,000	360.216.000	374,435,000	374,435,000	383.914.000	360,216,000	369.695.000	350.736,000	402.873.000	355,476,000	360.216.000	898.391.000	898.391.000	383.914.000	383,914,000	383.914.000	350.736.000	383.914.000	The same of the sa

N <sub>0</sub>	Nama Daerah	Kategori	Kategori	Klasifikasi Kategori ategori Kategori	Kategori	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Output	ian han stan	Peng Pena M	Target Minimal O Pengawasan Bim Penanaman Tekni Modal Ui	Target Minimal Output Keglatar Pengawasan Bimbingan Penanaman Teknis Pelaku Modal Usaha Output
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha	F 67 12	n Output gi (Pelaku Usaha)	27
Ξ	(2)	(3)	74	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	
7	Kabupaten Garut	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
00	Kabupaten Indramayu	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
Φ	Kabupaten Karawang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253 -
10	Kabupaten Kuningan	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15		238	238
П	Kabupaten Majalengka	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
12	Kabupaten Purwakarta	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253
G	Kabupaten Subang		Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
7	Kabupaten Sukabumi	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	6	16		258	258 -
15	Kabupaten Sumedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8	15	۱ ۱	240	240 -
16	Kabupaten Tasiknalaya	Rendah	Tinggi	Tinggi	Mudah	8	15		238	238 -
17	Keta Bandung	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
.00	Kota Bekasi	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
19	Kota Bogor	Tinggi	Thuggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253
20	Kota Cirebon	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15		245	245
21	Kota Depok	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
22	Kota Sukabumi	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	L	234	234
23	Kota Tasikmalaya	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15		234	234
24		Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16		249	249
25	Kota Banjar	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	o on	14		221	
26	Kabupaten Bandung Barat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	id.	10	L.	253	253
27	Kabupaten Pangandaran	Rendah	Sedang	Rendah	Mudah	Ó	4		221	221

393,394,000			1200	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Sukoharjo	25
402.873,000	¥.	10	249	16	9	Mudah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Smgen	24
383,914,000			258	10	ď	Mudah	Tinggi	18gmi	inggi	Kabupaten Semarang	23
374.435,000	,		245	15	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Kabupaten Rembang	22
369,695,000			234	155	60	Mudah	Sedang	Tinggi	Rendah	Kabupaten Purworejo	21
			1000				· Common of	9		Purbalingga	1
350.736.000			225	14	00 0	Mudah	Sedana	Sedima	Rendah	Kabupaten remaiang	20
383,914,000	¥	4	240	10	o co	URDUM	Sedang	Dilling.	Secang	Kabupaten Pekatongan	10
374,435,000	¥	0.00	245	15	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Kabupaten Pati	17
383,914,000	,	1	240	15	00	Mudah	Sedang	Tinggi	Sedang	Kabupaten Magelang	16
412.352.000	*		245	15	9	Mudah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Kudus	15
374.435,000		10	245	15	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Sedang	Kabupaten Klaten	14
412,352,000	*		245	15	9	Mudah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Kendal	13
360.216.000	,	*	238	15	8	Mudah	Tinggt	Tinggt	Rendah	Kabupaten Kebumen	12
393.394.000		*	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Karanganyar	11
402,873,000	¥	*	249	16	9	Mudah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Jepara	10
393,394,000	,	1000	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Grobogan	9
393.394.000	,	*	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Demak	00
393,394,000			253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Cilacap	7
393,394,000	77	***	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Brebes	6
393,394,000		*	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Boyolali	Un
369,695,000		9.8	234	15	8	Mudah	Sedang	Tinggi	Rendah	Kabupaten Blora	4
393,394,000	Ψ.	25	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Batang	33
393,394,000	*	\$15 \$25	253	16	9	Mudah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Kabupaten Banyumas	12
341.257.000			230	14	90	Mudah	Tinggi	Sedang	Rendah	Kabupaten Banjarnegara	-
898.391.000	1	200.000.000	384	18	12	Mudah	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Provinsi Jawa Tengah	XI
(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	3
Modal	Output (Video Promosi Digital)	Alokasi Provinsi	Output (Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Kategori Aksesibilitas Geografis	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Realisasi Investasi		
DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman	han Promosi n Modal	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Penyelesajan Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha		Klasifikasi Kategori	Klasifik		Nama Daerah	No.
		iatan	nimal Output Kegiatan	Target Minimal Or							

5 K	8	4 K	3 50	2	22 K	1 K.	XII Pr	5 K	4 K.	3 K	22 Ki	1 K	XII Pr		34 K	33 K		31 K	30 K	29 K		27 Ka	26 Ka	Ξ		N <sub>0</sub>	
Kahumaten Greett	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten Blitar	banyuwango	Kabupaten	Kabupaten Bangkalan	Provinsi Jawa Timur	Kota Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Tegal	Kota Surakarta	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kota Pekalongan	Kota Magelang	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Temanggung	Kabupaten Tegal	(2)		Na ma Daera h	
Tinggi	Sedang	Rendah	thagar.		Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	(3)	Kategori Realisasi Investasi		
Tinggi	Tinggi	Tinggi	(SSut)		Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Thuggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	(4)	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Klasifik	
Sangat	Sedang	Sangat Tinggi	(Sour)	tagett 1	Sangat	Sedang	Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sediang	Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	(5)	Kategori Kapasitas Fiskal	Klasifikasi Kategori	
Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	1	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	Mudah	(6)	Kategori Aksesibilitas Geografis		
9	8	9	2		9	œ	12	9	9	60	8	8	10	60	9	9	80	00	8	8	8	00	9	(7)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	
16	15	15	10		16	14	18	16	16	15	14	in.	15	14	15	16	15	14	14	14	14	15	16	(8)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Target Minimal Or
258	240	242	253		1258	225	384	253	253	236	230	234	329	230	245	258	232	221	225	225	225	234	253	(9)	Output (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	nimal Output Kegiatan
					25	*	200.000.000	10		34		3	200,000,000				*		40	24	835 10		-	(10)	Alokasi Provinsi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	iatan
		·			1		1	932	-			1	1		•		*	1			4			(11)	Output (Video Promosi Digital)	ahan Promosi an Modal	
383,914,000	383.914.000	350.736.000	393,394,000		383.914.000	350,736,000	898.391.000	393,394,000	393,394,000	393,394,000	341.257,000	369,695,000	842.935.000	379.175,000	374.435.000	383.914.000	364.955.000	360.216.000	350.736.000	350.736.000	350.736,000	369.695,000	393,394,000	(12)	Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi	

			Klasifii	Klasifikasi Kategori		Penyelesajan Permasalahan	esa jan a lahan	Peng	Target Minimal Ou Pengawasan Bimbi	Target Minimal Ou Pengawasan Bimbi
No.	Nama Daerah	0	2			Pelaku Usaha	Modal			
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	27	Output Pelaku Usaha)	Output Alokasi Pelaku Usaha) Provinsi
3	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	3	(8)		(9)	(9) (10)
-1	Kabupaten Jember	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16	-	258	258
00	Kabupaten Jombang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16	- 1	253	253 +
9	Kabupaten Kediri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253 -
10	Kabupaten Lamongan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253 -
***	Kabupaten Lumajang	Sedang	Tingut	Timuti	Mudah	9	15	.	245	245 +
12	Kabupaten Madiun	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	00	15		236	236 -
50	Kabupaten Magetan	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	80	15	4	234	234
7	Kabupaten Malang	Tinggi	Tinggi	Timegi	Mudah	9	16	Ш	253	253
15	Kabupaten Mojokerto	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253
16	Kabupaten Nganjuk	Sedang	Tinget	Rendah	Mudah	8	15	.	236	236
17	Kabupaten Ngawi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	0.00	249	249
18	Kabupaten Pacitan	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14	5.54	225	225 -
19	Kabupaten Pamekasan	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	.80	15		234	234
20	Kabupaten Pasuruan	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	ø	16		258	258
21	Kabupaten Ponorogo	Rendah	Tinggi	Timpi	Mudah	8	55	12.00	238	238
22	Kabupaten Probolinggo	Tinggi	Sedang	Tinggi	Mudah	9	15	900	245	245
23	Kabupaten Sampang	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	8	14		225	225
124	Kabupaten Sidoarjo	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9	16		258	258
25	Kabupaten Stubondo	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15		240	240 -
26	Kabupaten Sumenep	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	200	234	234
27	Kabupaten Trenggalek	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15		234	234
28	Kabupaten Tuban	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		253	253
29	Kabupaten Tulungagung	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	on	5		234	234
30	Kota Blitar	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	00	14		225	225 -
31	Kota Kediri	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	9	15	l	245	245
32	Kota Madnin	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	80	55		232	232 -
5	Kota Malang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15		245	245

No	Na ma Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Peng Pena M	Peng Pena M	Target Mini Pengawasan Penanaman Modai
3		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografia		Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)
3	(2)	(3)	4	(5)	(6)	3	(8)	(9)	(10)	
34	Kota Mojokerto	Rendah	Sedang	Sedang	Mudah	So	14	225		883
33	Kota Pasuruan	Rendah	Sedang	Sangat	Mudah	00	14	217		
36	Kota Probolinggo	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	9	16	249	10	XX
37	Kota Surabaya	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	٥	16	258	25	
38	Kota Batu	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	227		0.33
AIX	Provinsi Kalimantan Barat	Sedang	Sedang	Sedang	Mudah	10	15	332	200.000.000	
+	Kabupaten	Tinggi	Sedang	Sangat	Sedang	00	7	215		- 50
2	Kabupaten Landak	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	00	14	223	+	
¢o.	Kabupaten Kapuas	Sedang	Sedang	Sedang	Seding	00	14	215	T#	
4	Kabupaten Ketapang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedung	8	15	232		
GR.	Kabupaten Mempawah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	8	14	219	*	200
6	Kabupaten Sambas	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215	100	
7	Kabupaten Sanggau	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15	232	-	0.000
00	Kabupaten Sintang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	236	150	
9	Kota Pontianak	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	00	15	232	+	007
0.1	Kota Singkawang	Rendah	Sedang	Sangat	Seding	7	13	199	100	
11	Kabupaten Sekadau	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223		
12	Kabupaten Melawi	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	210	*	
13	Kabupaten Kayong Utara	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	90	
14	Kabupaten Kubu Raya	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedung	50	15	232		953
VX	Provinsi Kalimantan Tengah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	9	14	310	200.000.000	
-	Kabupaten Barito Selatan	Tinggi	Rendah	Rendah	Sulit	7	1.3	206	*	

	Riasifikasi Kategori Penyelesaian  Realisasi Felaku Fiskal Geografis Pelaku Usaha  Investasi Usaha Fiskal Geografis Pelaku Usaha)  (3) (4) (5) (6) (7)  Rendah Salit 7	h Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Jumlah Fiskal Geografis Geogr	No. Nama Daerah		(1) (2)	2 Kabupaten Barito	Utara	3 Kabupaten K							0	1 0	2 1	3 2 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	VI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	41 4 3 2 1 0	VI 4 3 2 1 0
	Klasifikasi Kategori sasi Pelaku Fiskal Geografis Usaha Fiskal Geografis (4) (5) (6) Sedang Rendah Sulit Tinggi Tinggi Sulit Tinggi Sedang Sulit Tinggi Sedang Sulit  Tinggi Sedang Sulit  Tinggi Sedang Sulit  Tinggi Sedang Sulit  Tinggi Sedang Sulit  Tinggi Sedang Sulit	Klasifikasi Kategori Penyelesaian Peng Permasalahan Peng dan Hambatan Mangari Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kegiatan Pelaku Usaha Dusaha Piskal Geografis Usaha bagi Usaha Dusaha Sedang Rendah Sulit 7 13  Sedang Tinggi Sulit 8 14  Tinggi Sedang Sulit 8 14  Tinggi Sedang Sulit 8 14	nerah	In R								atment ingen											
	Kategori Aksesibiitas Geografis (6) Sult Sult Sult Sult Sult Sult Sult Sult	Penyelesaian Peng dan Hambatan Man Hambatan Man Peng dan Hambatan Man Peng dan Hambatan Man Peng dan Hambatan Man Man Man Man Man Man Man Man Man M	Klasifikas	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	3					200	h	Rendah			-51								
Klasifikas  Kategori  Jumlah  Pelaku  Usaha  [4]  edang  edang  inggi  inggi  inggi  inggi	tte gori sibilitas ografia (6) 7	Penyelesaian Peng Permasalahan Peng dan Hambatan Peng dan Hambatan Peng Gutput (Kegatan Usaha bagi Pelaku Usaha bagi Pelaku Usaha)  (6) (7) 13  (6) (7) 13  Ah 8 14  B 15	i Kategori	Kategori Kapasitas Fiskal	(5)	Rendah	Finggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Sangat		Sangat Rendah	Sangat Rendah Sedang	Sangat Rendah Sedang Rendah	Sengat Rendah Sedang Rendah	Sangat Rendah Sedang Rendah Sedang Sangat Sangat	Sangat Rendah Sedang Rendah Rendah Sedang Sedang	Sengat Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang	Sangat Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang	Sangat Rendah Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang Sedang
Klasifikasi Kategori Jumlah Pelaku Fiskal Usaha Fiskal Usaha Fiskal Usaha (5) edang Rendah edang Tinggi inggi Sedang endah Rendah Rendah Rendah Rendah	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha) (7) 7	Penyelesaian Permasalahan Penku Usaha Output (Keglatan Usaha bagi Pelaku Usaha) 13		Kategori Aksesibilitas Geografis	(6)	Sulft	Sulit	Sulit	Sulft	Mudah	Sedang	Sulit	Sulit		Sulit	Sulft	Sulft Sulft Sedang	Sulft Sulft Sedang Sedang	Sulft Sedang Sedang Sulft Sulft	Sulft Sulft Sedang Sedang Sulft Sulft	Sulit Sulit Sedang Sulit Sulit Sulit Sulit	Sulit Sedang Sulit Sedang Sulit Sulit Sulit Sedang Mudah Sedang	Sulit Sedang Sulit Sulit Sulit Sulit Sedang Sedang Sedang
ori Kategori ah Kategori ah Kategori ah Kapasitas tu Fiskal a (5) Rendah Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang Rendah Rendah Rendah		Keng Keng Make	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	(7)	7	60	8	8	80	7	7	2		7	8 7	7 7 7	88 7 88 7	7 88 7 80 7	7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
sifikasi Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kapasitas Aksesibilitas Usaha Man Hambatan Penanaman Teknis (Kegiatan Kapasitas Aksesibilitas Usaha bagi Usaha bagi Pelaku Usaha bagi Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha) Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha) Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha			Penyusunan Ba Penanama	Aloka si Provinsi	(01)		*	1			*:					# 10 m	4 1 14 4	24 4 1 14 4		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
ru Fiskal Geografis Pelaku Usaha Delaku Usaha Geografis Pelaku Usaha Delaku Usaha Geografis Pelaku Usaha Delaku Usaha Delaku Usaha Delaku Usaha Delaku Usaha Delaku Usaha Delaku Usaha Dagi (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)  Rendah Sulit 7 13 221  Sedang Sulit 8 14 225  Rendah Sedang 7 13 232  Rendah Sulit 7 13 232  Rendah Sulit 7 13 232	utput Kegi kingan Pelaku aha tput Usaha)	Penyusunan Ba Penanama Alokasi Provinsi (10)	han Promosi n Modal	Output (Video Promosi Digital)	(11)					¥	*				,		A 1			<b>34</b> ( ) ( )	x 100 x x x		
Finggi Sulit 7 13 225	jingan Pelaku Penyusunan Bahan Promoi Pelaku Penanaman Modal aha Alokasi (Video I Usaha) Provinsi Digital) 9) (10) (11)	yusunan Bahan Promot Penanaman Modal  Output (Video rovinsi Digital)  (10) (11)	DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman	Modal	(12)	426,571,000	407.613.000	426,571,000	436.051.000	383,914,000	393,394,000	412.352,000	421.832.000	421 832 000	741.004.000	417.092.000	417.092.000	417.092.000 374.435.000 417.092.000	417.092.000 374.435.000 417.092.000 421.832.000	417.092.000 374.435.000 417.092.000 421.832.000 887.300.000	417.092.000 374.435.000 417.092.000 421.832.000 <b>887.300.000</b>	417.092.000 374.435.000 417.092.000 421.832.000 887.300.000 379.175.000	417.092.000 374.435.000 417.092.000 421.832.000 421.832.000 887.300.000 379.175.000 360.216,000

-							Target M	Target Minimal Output Kegiatan	çiatan	
No.	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	n Modal
1		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	Output (Video Promosi Digital)
3	(2)	(3)	4	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
t/I	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	202		
6	Kabupaten Kotabani	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	90	14	217	*	
7	Kabupaten Tabalong	Tinggi	Sedang	Sedang	Sulit	8	14	217	10	+
00	Kabupaten Tanah Laut	Tinggi	Rendsh	Sedang	Seding	60	14	217	34	,
ė	Kabupaten Tapin	Tinggi	Rendah	Timer	Sedang	8	14	221	40	1
10	Kota Banjarbaru	Rendah	tagain	Sedang	Mudah	00	14	225		1
11	Kota Banjarmasin	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	15	245		
12	Kabupaten Balangan	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulf	7	13	210	*	e cir
13	Kabupaten Tanah Bumbu	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedung	os	14	227		
IVX	Provinsi Kalimantan Timur	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	10	15	339	200.000.000	1
1	Kabupaten Berau	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	8	15	236	16	*
13	Kabupaten Kutai Kartungara	Tinggi	(Sgnff	Sangat	Sedang	8	15	240		
6	Kabupaten Kutai Barat	Tinggi	Sedang	Sangat	Sedung	8	15	232		
4	Kabupaten Kutai Timur	Tinggi	iggnit	Sangat	Sedang	8	15	240	151	
C/I	Kabupaten Paser	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	8	14	227	*	Y
6	Kota Balikpapan	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	249		
7	Kota Bontang	Tinggi	(Shull)	Tinggi	Sedung	8	15	236	*	
ÓD	Kota Samarinda	Tinggi	tagent	Tinggi	Mudah	9	15	245		¥.
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	80	14	227		
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Tinggi	Rendah	Sedang	Sulit	7	13	210		
IVX	Provinsi Sulawesi Utara	Sedang	Rendah	Rendah	Sulit	9	13	294	200.000.000	1

Rategori Jumlah Realisasi Pelaku Piakal Geografis Investasi Usaha Rendah Sangat Sulit Rendah Rendah Rendah Sulit Rendah Rendah Rendah Sulit Rendah Rendah Rendah Sulit Rendah Rendah Sangat Sulit				Klasifik	Klasifikasi Kategori			Penyelesa ian Permasa lahan	Peng	Target Minimal Or Pengawasan Bimb	Target Minimal Output Kegiatan Pengawasan Bimbingan Peny
Interest	No.	Nama Daerah	0				dan Hambatan Pelaku Usaha	Modal	Usaha Usaha	Penanaman Modal	in M
Realian   Pelaku   Capara   Pelaku   Capara	100000	Agent Management	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Output	Output	The contraction of the contracti		$\overline{}$
13			Kategori Realisasi Investasi	Jumiah Pelaku Usaha	Kapasitas Finkal	Kate gori Akse sibilitas Geografis	(Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	(Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Alokasi Provinsi	
Kahupatern Bolaang         Tinggi         Sectang         Rendah         Sulit         7         13         212           Kahupatern Bolaang         Rendah         Rendah         Rendah         Rendah         Sedang         7         12         197           Kahupatern Sanghe         Rendah         Rendah         Rendah         Sungat         Sulit         6         12         197           Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Rendah         Sungat         Sulit         6         12         197           Kota Manado         Tinggi         Rendah         Sengat         Sulit         6         12         187           Kabupaten Minahasa         Sedang         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Rendah         Sedang         Rendah         Sedang         7         13         199           Kabupaten Kepi Siau         Pendah         Sedang         Rendah         Sulit         7         13         212         187           Kabupaten Kepi Siau         Rendah         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Kota Kotambagu	3	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Kabupaten Minahasa         Rendah         Rendah         Rendah         Sedang         7         12         197           Kabupaten Sangihe         Rendah         Rendah         Rendah         Sangat         Sull         6         12         197           Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Rendah         Sangat         Sull         9         14         221           Kota Manado         Tinggi         Tinggi         Mudah         9         15         245           Kabupaten Minahasa         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Minahasa         Rendah         Sedang         Rendah         Mudah         7         13         212           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Rendah         Sangat         Sedang         7         13         212           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Rendah         Sullit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Rendah         Sedang         7         13	1	Kabupaten Bolaang Mongondow	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulft	7	13	212		
Kabupaten Sangite         Rendah         Rendah         Rendah         Sulit         6         12         187           Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Rendah         Rendah         Mudah         9         14         221           Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Rendah         Mudah         9         15         245           Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kota Shupaten Minahasa         Sedang         Rendah         Sangat         Sullit         7         13         199           Kota Kota Shupaten Minahasa         Tinggi         Sedang         Rendah         Sullit         7         13         212           Kabupaten Kep, Siau         -         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Kep, Siau         -         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit	N	Kabupaten Minahasa	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	~	12	197	200	- 1
Kota Bitung         Tinggi         Rendah         Rendah         Mudah         8         14         221           Kotu Manado         Tinggi         Tinggi         Tinggi         Mindah         9         13         245           Kabupaten Kepulauan         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Minahasa         Sedang         Rendah         Rendah         Rendah         Sedang         7         13         199           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Sedang         Rendah         Sullit         7         13         212           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Sedang         Rendah         Sullit         6         12         13         212           Kabupaten Minahasa         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Balang         Rendah         Rendah         Sangat         Sullit         6         12         187           Kabupaten Balang         Rendah         Rendah         Sangat         Sedang         7         12         187           Kabupaten Banggal         Rendah         Rendah         Sangat	ω	Kabupaten Sangihe	Rendah	Rendah	Sangat	Sulf	6	12	187	10	0 8
Kota Manado         Tinggt         Tinggt         Tinggt         Tinggt         Mudah         9         15         245           Kabupaten Kepulauan         Rendah         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Talaud         Rendah         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Kabupaten Minahasa         Sedang         Rendah         Sangat         7         13         199           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Sedang         Rendah         Mudah         7         13         212           Kabupaten Minahasa         Tinggi         Sedang         Rendah         Sulit         6         12         187           Kabupaten Balaang         Rendah         Rendah         Sangat         Mudah         7         13         212           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sangat         Sulit         6         12         187           Kabupaten Bolaang         Rendah         Rendah         Sedang         7         12         193 <td>4</td> <td>Kota Bitung</td> <td>Tinggi</td> <td>Rendah</td> <td>Rendah</td> <td>Mudah</td> <td>OS.</td> <td>14</td> <td>221</td> <td>30</td> <td></td>	4	Kota Bitung	Tinggi	Rendah	Rendah	Mudah	OS.	14	221	30	
Kabupaten Kepulasuan Rendah Rendah Sangat Sulit 6 12 187  Kabupaten Minahasa Sedang Rendah Sangat Sedang 7 13 199  Kota Tomohom Rendah Sedang Rendah Mudah 7 13 212  Kabupaten Minahasa Tinggi Sedang Rendah Sulit 7 13 212  Kabupaten Minahasa Tinggi Sedang Rendah Sulit 7 13 212  Kabupaten Minahasa Tinggi Sedang Rendah Sulit 7 13 212  Kabupaten Bolaang Blaro Kabupaten Minahasa Rendah Rendah Sangat Mudah 7 13 222  Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Sangat Sedang 7 13 202  Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Sangat Tenggata Tenggata Tenggata Rendah Rendah Sangat Sedang 7 12 187  Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Sangat Sedang 7 12 193  Mongondow Selatan Rendah Rendah Rendah Sangat Sedang 7 13 199  Mongondow Selatan Rendah Rendah Rendah Sangat Sedang 7 13 199  Kabupaten Banggal Tinggi Sedang Rendah Rendah Sulit 6 12 187  Kabupaten Banggal Rendah Rendah Rendah Sulit 7 13 214  Kabupaten Banggal Rendah Rendah Sangat Sulit 6 12 187	ch	Kota Manado	Tinggi	Thege	Tinggi	Mudah	9	15	245	3.8	0.33
Kabupaten Minahasa     Sedang     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       Kabupaten Minahasa     Tinggi     Sedang     Rendah     Mudah     7     13     212       Kabupaten Kep, Siau      Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Rep, Siau      Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Mudah     7     13     202       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     193       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Li Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah <td>6</td> <td>Kabupaten Kepulauan Talaud</td> <td>Rendah</td> <td>Rendah</td> <td>Sangat</td> <td>Sulf</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>187</td> <td>.90</td> <td></td>	6	Kabupaten Kepulauan Talaud	Rendah	Rendah	Sangat	Sulf	6	12	187	.90	
Sedang   Rendah   Sedang   Rendah   Mudah   7   13   212	7	Kabupaten Minahasa	Sedang	Rendah	Sangat	Sedang	7	13	561		- 63
Kabupaten Minahasa Tinggi Sedang Rendah Sulit 7 13 212  Kabupaten Kep, Siau - Rendah R	lo l	Kota Tomohon	Dondah	Swiana	Dendah	Madah	7	T.	212		1
Utara       Utara       0 Kabupaten Kep, Siau     -     Rendah     Sangat     Sullt     6     12     187       1 Kabupaten Kep, Siau     -     Rendah     Sangat     Sullt     6     12     187       1 Kota Kotamobagu     Rendah     Rendah     Sangat     Mudah     7     13     202       2 Kabupaten Balaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       3 Kabupaten Minahasa     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     12     193       4 Kabupaten Balaang     Sedang     Rendah     Sangat     Sedang     7     12     193       5 Kabupaten Balaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       5 Kabupaten Balaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sullt     6     12     187       5 Kabupaten Balaang     Rendah     Rendah     Rendah     Sangat     Sullt     6     12     187       6 Kabupaten Balaang     Rendah     Rendah     Rendah     Sangat     Sullt     6     12     187       7 Tengah     Rendah     Rendah     Rendah     Rendah     Rendah     Salaang     Rendah     Salaang	0 0	Kabupaten Minahasa	Tinggi	Sedana	Rendah	Sulf	7	to t	212		248
Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Blaro Kota Kota mobagu Kota mobagu Rendah Rendah Kabupaten Bolaang Kendah Rendah Rendah Rendah Kabupaten Minahasu Rendah Rendah Rendah Rendah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Sangat Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Rendah Sangat Kabupaten Bolaang Rendah Rendah Rendah Sangat Sedang Rendah	4	Kabupaten Minahasa Utara	Tinggr	Sedang	Rendah	Sunt	7	13	212	100	
Kota Kota mobagu     Rendah     Rendah     Sangat     Mudah     7     13     202       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulir     6     12     187       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulir     6     12     193       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     12     193       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       Kabupaten Benggal     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     9     13     294     200,000,00       Kabupaten Banggal     Rendah     Rendah     Sulit     7     13     294     200,000,00	10	Kabupaten Kep, Siau Tagulandang Biaro		Rendah	Sangat	Sulff	6	12	187		, e.
Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     12     193       Kabupaten Belaang     Sedang     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Kabupaten Belaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Provinsi Sulawesi     Sedang     Rendah     Rendah     Sulit     9     13     294     200,000,00       Kabupaten Banggal     Rendah     Rendah     Sulit     7     13     212     187	11	Kota Kotamobagu	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Mudah	7	13	202		
Kabupaten Minahassa     Rendah     Rendah     Sangat     Sedang     7     12     193       Tenggara     Rendah     Rendah     Sedang     7     13     199       Kabupaten Bolaang     Sedang     Rendah     Sangat     Sedang     7     13     199       Kabupaten Bolaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Provinsi Sulawesi     Sedang     Rendah     Rendah     Sulit     9     13     294     200,000,00       Kabupaten Banggal     Tinggi     Sedang     Rendah     Sulit     7     13     212     187	12	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Rendah	Rendsh	Sangat Rendah	rims	6	12	187	24	
Kabupaten Bolaang Mengondow Timur Kabupaten Bolaang Mendah Kabupaten Bolaang Mendah Kendah Kabupaten Banggai Kabupaten Banggai Kendah Kabupaten Banggai Kendah Kend	13	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	7	12	193	7.0	-S - C
Kabupaten Bolaang     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187       Provinsi Sulawesi     Sedang     Rendah     Rendah     Sulit     9     13     294     200,000,00       Kabupaten Banggal     Tinggi     Sedang     Rendah     Sulit     7     13     212     212       Kabupaten Banggal     Rendah     Rendah     Sulit     7     13     212     187	14	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Sedang	Rendah	Sangat	Sedang	7	13	199	*	
Provinsi Sulawesi     Sedang     Rendah     Rondah     Sulit     9     13     294     200,000,00       Tengah     Tengah     Tinggi     Sedang     Rendah     Sulit     7     13     212       Kabupaten Banggai     Rendah     Rendah     Sangat     Sulit     6     12     187	15	Kabupaten Bolsang Mongondow Selatan	Rendah	Rendah	Sangat	HINS	6	12	187	. 10	
Kabupaten Banggai Tinggi Sedang Rendah Sulit 7 13 212  Kabupaten Banggai Rendah Rendah Sangat Sulit 6 12 187	××	Provinsi Sulawesi Tengah	Sedang	Rendah	Rendah	Sulit	9	13	294	200.000.000	- 0
Kabupaten Banggai Rendah Rendah Sangat Sulit 6 12 187	1	Kabupaten Banggai	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7	13	212	*	000
	13	Kabupaten Banggai	Rendah	Rendah	Sangat	Sulit	6	12	187		- 2

			Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan	2000	Peng	Target Minimal C	Target Minimal Output Kegiatan Pengawasan Bimbingan Pengawasan Teknis Pelaku Peny
No.	Nama Daerah					dan Hambatan Pelaku Usaha	Modal	Teknis Pelaku Usaha	Penanaman Modal	n Mo
		Kategori Realisasi	Kategori Jumlah Pelaku	Kategori Kapasitas	Kate gori Akse sibilitas	Output (Kegiatan Usaha bagi	Output (Kegiatan Usaha bagi	Output (Pelaku Usaha)	Aloka si Provinsi	Output (Video Promosi
	(000)	100000000000000000000000000000000000000	Contra			retaku vsanaj	reman coanal		1000000	Digital
Ξ	(2)	(3)	(4)	(0)	(0)	(7)	(0)	(4)	luti	(11)
W	Kabupaten Buol	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	7	12	193		6 80
4	Kaburaten Toli-toli	Sedana	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	210	6	
in.	Kabupaten Donggala	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191	10	
6	Kabupaten Morowali	Tinggi	Sedang	Rendah	sulit	7	13	212	*	-50
7	Kabupaten Poso	Tinggi	Rendah	Sangat	Sedang	9	16	251	40	
00	Kota Palu	Tinggi	iggail	Sangat	Mudah	12	21	335		
9	Kabupaten Parigi Moutong	Rendah	Rendah	Rendah	HINS	7	12	191		20
10	Kabupaten Tojo Una Una	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	7	12	191		
11	Kabupaten Sigi	Rendah	Suepos	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199	10	
12	Kabupaten Banggai Laut	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	#ms	9	12	187		
13	Kabupaten Morowali Utara	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sulfr	7	13	202	2 3	× ×
X	Provinsi Sulawesi Selatan	Sedang	Sedang	Sedang	Sulit	9	14	300	200.000.000	8
1	Kabupaten Bantseng	Tinggi	Rendah	Rendah	Mudah	8	14	221	2*	N-50
13:	Kabupaten Barru	Rendah	Rendah	Sangat	Mudah	7	50	202	*	
Č.	Kabupaten Bone	Rendah	Sedang	Tinggt	Sedang	7	13	212		
+	Kabupaten Bulukumba	Rendah	Rendah	Sedang	Mudah	7	13	210	9 50	2 32
SN.	Kabupaten Enrekung	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13	204		
6	Kabupaten Gowa	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	8	15	232	2	
7	Kabupaten Jeneponto	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	8	14	227	*	5.0
00	Kabupaten Luwu	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	215		

	1	X	3	24	23	222	21	20	19	20	17	16	15	14	13	12	11	10	9	(3)		No	-
Control of the Contro	Kabupaten Buton	Provinsi Sulawesi Tenggara	Utara	Kabupaten Toraja	Kota Makassar	Kota Pare-pare	Kabupaten Wajo	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten Takalar	Kabupaten Soppeng	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten Kepulauan Selayar	Kabupaten Sinjai	Kabupaten Finrang	Kabupaten Luwu Timur	Kota Palopo	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten Maros	Kabupaten Luwu Utara	(2)		Nama Daerah	
Rendah	Rendah	Sedang	Contraction of Contra	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	(3)	Kategori Realisasi Investasi		
Sedano	Rendah	Sedang	Note and the second	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	(4)	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Klasifik	
Timeri.	Sangat	Rendah	D. Carrier Market	Sedang	Sangat Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Sangat	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	(5)	Kategori Kapasitas Fiskal	Klasifikasi Kategori	
Sulf	Sedang	Sulit		Sedang	Mudah	Mudah	Sedung	Sedang	Sedang	Mudah	Sedang	Sulit	Mudah	Sedang	Sulit	Mudah	Mudah	Mudah	Sulit	(6)	Kategori Aksesibilitas Geografis		
4	7	9	i s	7	ø	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	7	7	90	7	(7)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	
13	12	13		13	16	13	12	13	12	13	13	12	13	22	14	13	13	14	12	(8)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Target M
206	193	294		202	124	212	197	212	193	202	212	197	210	204	217	202	212	225	197	(9)	Output (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Target Minimal Output Kegiatan
		200.000.000							8 3		to			14	15	.10	8 3	*		(10)	Alokasi Provinsi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	iatan
		1		3		*	**			10			,	1	18.				0 8	(11)	Output (Video Promosi Digital)	ahan Promosi an Modal	
374,435,000	369.695,000	920.573.000	State of the state	350,736,000	383.914,000	360,216,000	360.216.000	393.394.000	369.695.000	355,476,000	355.476,000	393.394.000	336.517,000	374.435.000	417.092.000	355,476,000	360,216,000	369,695,000	393,394,000	(12)	Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman	

No	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Bim Penanaman Tekni Modal U	inimal Output Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha Pen	jatan Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	than Promosi in Modal
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Aloka si Provinsi	Output (Video Promosi Digital)
Ξ	(2)	(3)	(A)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
W	Kabupaten Kolaka	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	8	14	223		
4	Kabupaten Muna	Rendah	Rendah	Sangat	Seding	7	12	193	25	
in.	Kota Kendari	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	œ	15	240	100	× 67
6	Kota Bau-bau	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	8	15	236	34	.50
7	Kabupaten Konawe Selatan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	60	14	219	30	
00	Kabupaten Bombana	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Hins	7	13	202		
9	Kabupaten Wakatobi	Rendah	Rendah	Sangat	HINS	9	12	187	-	
10	Kabupaten Kolaka Utara	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	7	12	193		
11	Kabupaten Konawe Utara	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sulft	7	12	193	16	
12	Kabupaten Buton Utara	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedung	7.	12	193		
13	Kabupaten Konawe Kepulauan	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197		8 8
14	Kabupaten Kolaka Timur	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sedang	7	13	199		
15	Kabupaten Muna Barat	Rendah	Rendsh	Sangat	Sedung	2	12	193	2.	
16	Kabupaten Buton Tengah	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Bullt	6	12	187		***
17	Kabupaten Buton Selatan	Rendah	Rendah	Sangat	Sedung	7	12	193		
= X	Provinsi Bali	Sedang	Sedang	Rendah	Mudah	10	15	329	200,000,000	5,410
1	Kabupaten Badung	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah	9	16	258		
22	Kabupaten Bangli	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	13	206		

			Klasifii	casi Kategori		Penyelesaian Permasalahan	Target Minimal O	inimal Output Kegiatan Bimbingan Pen	Penv	asunan Ba	usunan Bahan Promosi
No.	Nama Daerah	Ť.	Klasifii	Klasifikasi Kategori		Permasa lahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	wa san	+	Bimbingan Teknis Felaku Usaha	T.E.
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku	Kategori Kapasitas Finkal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi	Output (Kegiatan Usaha bagi	£ 5 °	t in Output igi (Pelaku Usaha)	21	Output Alokasi (Pelaku Usaha) Provinsi
3	(2)	(3)	4	(5)	(6)	(7)	(8)	- 0	(9)	(9) (10)	(9)
Car Car	Kabupaten Buleleng	Sedang	Sedang	Timpi	Sedang	On .	14		227	227	227
4	Kabupaten Gianyar	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedung	œ	15		236	236 -	236
tn	Kabupaten Jembrana	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	8	14		217	217	217
6	Kabupaten Karangasem	Rendah	Thaggi	Sedang	Sedang	8	14		225	225	7. S
7	Kabupaten Klungkung	Sedang	Sedang	Sedang	Sedlang	8	14		223	223	
(20)	Kabupaten Tabanan	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	00	14		227	227 -	227 -
ø	Kota Denpasar	Tinggi	Tinggi	Rendah	Mudah	6	15		245	245	245
ΞX	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	9	14	u	310	310 200.000.000	* **
	Kabupaten Bima	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	7	13		208	208 -	208
2	Kabupaten Dompu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	00	14	000	217	217 -	217
Ç.	Kabupaten Lombok Barat	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15		236	236	820
4	Kabupaten Lombok Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	8	14		221	221	3. &
UI.	Kabupaten Lombok Timur	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	8	14		225	225	)
6	Kabupaten Sumbawa	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	8	15		236	236 -	236
7	Kota Mataram	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	9	16		249	249 -	***
00	Kota Bima	Sedang	Sedang	Sangat	Sedang	7	13		210	210 -	3
6	Kabupaten Sumbawa Barat	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	8	14		217	217 -	
10	Kabupaten Lombok Utara	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	8	14		215	215	215
VX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	9	14		300	300 200.000.000	
+	Kabupaten Alor	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sult	6	12		187	187	187
N2	Kabupaten Belu	Rendah	Rendah	Sedang	Sulft	7	12		195	195 -	195

No	Na ma Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Bim Penanaman Tekni Modal U	nimal Output Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	han Pr
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Aloka si Provinsi	
3	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Ea.	Kabupaten Ende	Tinggi	Rendah	Sangat	Sedang	7	13	208		
4	Kabupaten Flores Timur	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	*	
UI.	Kabupaten Kupang	Sedang	Rendah	Rendah	Mudah	7	13	212	5.5	534
6	Kabupaten Lembata	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7	12	193	. 10	
7	Kabupaten Manggarai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedung	7	12	197		-50
00	Kabupaten Ngada	Rendah	Rendah	Sangat	Sult	6	12	187	*	
9	Kabupaten Sikka	Sedang	Tinggi	Rendah	TILLE	7	13	212	*	-1
0.1	Kabupaten Sumba Barat	Rendah	Rendah	Sangat	tims	9	12	187		00 840
11	Kabupaten Sumba Timur	Tinggi	Suepos	Rendah	tilus	7	13	212	10	
12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rendah	Sedang	Sedang	#ms	7	13	202		
13	Kabupaten Timor Tengah Utara	Bendah	Sedang	Sangat	Sulit	7	12	193		N 8
14	Kota Kupang	Tinggi	ingent?	Rendah	Mudah	8	15	236	38	П
15	Kabupaten Rote Ndao	Rendah	Rendah	Sangat	tilus	6	12	187	7.9	100
16	Kabupaten Manggarai Barat	Tinggi	Sedang	Rendah	Bullt	7	13	212	*:	~
17	Kabupaten Nagekeo	Rendah	Rendah	Sangat	ums	9	12	187		
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	Sedang	Rendah	Sangat	HINS	2.	12	193	25	50
19	Kabupaten Sumba Tengah	Rendah	Rendah	Sangat	Sulit	9	12	187		0 00
20	Kabupaten Manggarai	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	197	16	

6 Kabupa 7 Kabupa 8 Kabupa 8 Kabupa 9 Kota Tu 10 Kabupa 11 Kabupa 11 Kabupa 11 Kabupa 11 Kabupa	1X - 0	1X 1 0	1 0	- 0	0				3 200		5 Kota	4 Kab	3 Kab Ten	2 Kabupa Tengah	1 Kab	V Prov	100	21 Kabup Raijua	(1)		o N	
Kabupaten Kepulauan Aru Kota Tual Kabupaten Maluku Barat Daya Barat Daya Kabupaten Buru Selatun <b>Provinsi Papua</b>	Thal Thal upaten Maluku upaten Buru tan tan	upaten Kepulauan Tual upaten Maluku d Daya upaten Buru lan	upaten Kepulauan Thal Upaten Maluku upaten Maluku upaten Buru tan	Tual Tual upaten Maluku t Daya t Daya	upaten Kepulauan Tual Upaten Maluku it Daya	upaten Kepulauan Tual	upaten Kepulauan		Kabupaten Seram Bagian Timur	Bagian Barat	Kota Ambon	Kabupaten Buru	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Provinsi Maluku	Kabupaten Malaka	Kabupaten Sabu Raijua	(2)		Nama Daerah	
Rendah	Sedang	Sedang			Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	(3)	Kategori Realisasi Investasi		
Common Co	CHEST	Rendsh	Rendah		Rendah	Rendah	Renduh	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	(4)	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Klasifik	
	Simple	Sedano	Tinggi	Rendah	Sangat	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Rendah	Sangat	Sangat Rendah	Sangat Rendah	(5)	Kategori Kapasitas Fiskal	Klasifikasi Kategori	
	mu	Sull#	Sulit	2000	Sedung	Sulit	Sult	Sulit	Sulft	Sullt	Mudah	Sedang	Sulit	Sult	Sulit	Sulit	Sulit	Sulft	(6)	Kategori Aksesibilitas Geografis		
	a	6	9		7	7	6	7	7	0	30	7	7	-2	6	00	6	6	(7)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	
	ī,	12	13		12	13	12	12	12	12	14	12	12	13	12	12	12	12	(8)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Target Minimal O
	187	187	294		681	206	187	193	191	187	219	189	193	206	187	272	187	187	(9)	Output (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	inimal Output Kegiatan
			300.000.000			. 19					***			18		250.000.000			(10)	Alokasi Provinsi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	iatan
		*	1		*		*	(8)				50	14.		*	1			(11)	Output (Video Promosi Digital)	nhan Promosi in Modal	
1400 500	309,093,000	369,695,000	876.208.000		369.695,000	402,873,000	379,175,000	393.394.000	369,695,000	379,175,000	364,955,000	369.695.000	393.394.000	402,873,000	379,175,000	909.482.000	388.654.000	388,654,000	(12)	Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman	

							Target Minimal O	inimal Output Kegiatan	iatan	
No.	Nama Daerah		Klasifik	Klasifikasi Kategori		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	2 00
		Kategori Realisa si Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Ka tegori Kapasitas Fiakal	Kategori Aksesibilitas Geografia	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output (Pelaku Usaha)	Aloka si Provinsi	
Ξ	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	3	(8)	(9)	(10)	
+	Kabupaten Merauke	Sedang	Tinggi	Tiruggi	Sedang	60	14	219		_
t)i	Kabupaten Mimika	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedung	7	13	212	9.5	-
ð	Kabupaten Nabire	Sedang	Rendah	Sangat	Sedang	7	12	161		
		200		Kendah				20000	8	1.
7	Kabupaten Paniai	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sulit	6	puri puri	178		
00	Kabupaten Puncak Jaya	Rendah	Rendah	Tinggi	Sulft	7	12	191		
9	Kabupaten Kepulauan Yapen	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	7	12	197	**	2
10	Kota Jayapura	Tinggi	Sedang	Rendah	Mudah	66	14	219	25	
111	Kabupaten Sarmi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	195	*	655
12	Kabupaten Keerom	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	313	353
13	Kabupaten Yahukimo	Rendah	Rendah	Tinggi	Sulf	7	12	191	*	ıl
14	Kabupaten Pesanungan Bintang	Rendah	Rendah	Rendah	Sulit	6	11	182		C 3
15	Kabupaten Tolikara	Rendah	Rendah	Tinggi	allus	7	12	191	30	1
91	Kabupaten Boven Digoel	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	7	13	208		3 0
17	Kabupaten Mappi	Rendah	Rendsh	Rendah	Sedang	7	12	189	40	
18	Kabupaten Asmat	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	6	12	184		- 5
19	Kabupaten Waropen	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189		
20	Kabupaten Supiori	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sult	6	11	178		- 2
21	Kabupaten Mamberamo Raya	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7	12	193	8 8	X X
22	Kabupaten Mamberamo Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	7	12	189	*	
23	Kabupaten Yalimo	Rendah	Rendah	Rendah	Sulfi	6	11	182	24	100
24	Kabupaten Lanny Jaya	Rendah	Rendah	Rendah	Sulft	6	11	182	**	1
125	Kabupaten Nduga	Rendah	Rendah	Sedang	Sul#	6	12	187		8

No	Nama Daerah		Klasifii	Klasifikasi Kategori			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	Peng	Target Minimal Or Pengawasan Bimb Penanaman Teknis Modal Us	Target Minimal O
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha	200	Output (Kegiatan d Usaha bagi ha) Pelaku Usaha)		Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)
Ξ	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	1.0	(8)	(8) (9)	(8) (9) (10)
26	Kabupaten Dogiyai	Rendah	Rendah	Rendah	Sulft	6		11	11 182	11 182
27	Kabupaten Puncak	Rendah	Rendah	Rendah	Sulft	6		111	11 182	11 182 -
28	Kabupaten Intan Jaya	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	7		12	100	100
29	Kabupaten Delyai	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	9		12	12 184	23
XX	Provinsi Maluku Utara	Sedang	Rendah	Sangat	Sulit	8		13	13 281	
Bet	Kabupaten Halmahera Tengah	Tinggi	Rendah	Sedang	Hins	7		13	13 206	
10	Kota Ternate	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	30		**	14 215	
ÇQ.	Kabupaten Halmahera Barat	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	2.		12	12 189	
*	Kabupaten Halmahera Timur	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	7		13	13 212	
51	Kabupaten Halmahera Selatan	Tinggi	Rendah	Sedung	Sulft	7		S	13 206	
0	Kabupaten Halmahera Utara	Tinggi	Rendah	Sedang	#Ins	7		13	13 206	
7	Kabupaten Kepulauan Sula	Rendah	Sedang	Sangat	sulit	2		12	12 189	
00	Kota Tidore Kepulauan	Rendah	Sedang	Sangat	Sulft	7		12	12 189	2
9	Kabupaten Pulau Morotai	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	7		12	12 189	
10	Kabupaten Pulau Taliabu	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	7		13	13 208	
VIII	Provinsi Banten	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah	11		17	17 371	- 6
-	Kabupaten Lebak	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	0		16		
13	Kabupaten Pandeglang	Sedang	Tinggi	Sedang	Mudah	68	1000	15		
ÇQ.	Kabupaten Serang	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	9		16	258	

No.	Nama Daerah	Kategori	Klasifikasi Kategori Kategori Kategori	Kate	egori		Pe Pe da da Rategori	Penyelessian Peng Permasalahan Peng dan Hambatan Penam Pelaku Usaha M Output Os Kategori (Kegiatan (Ke	Penyelesaian Pengawasan Bim Permasalahan Pengawasan Tekni dan Hambatan Modal U Pelaku Usaha Output Kategori (Kegiatan Ou	Penyelesaian Pengawasan Bimbingan Permasalahan Penanaman Teknis Pelaku Usaha Modal Usaha Kategori (Kegiatan (Kegiatan Output
		Kategori Realisasi Investasi	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Kategori Kapasitas Fiskal	Kategori Aksesibilitas Geografis	it as	Pel	Output (Kegiatan () Usaha bagi U Pelaku Usaha) Pel	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Output Output (Kegiatan (Kegiatan Usaha bagi Usaha bagi Pelaku Usaha) Pelaku Usaha)
Ξ	(2)	(3)	3	(5)	(6)		9	3	(7) (8)	(8)
	Kabupaten Tangerang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Mudah		9	9 16		16
ш	Kota Cilegon	Tinggi	Tinggi	Sedang	Mudah		9	9 16		16
	Kota Tangerang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah		9	9 16	202	16
100	Kota Serang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Mudah	-	9	9 16	353	16
	Kota Tangerang Selatan	'Inggi	Tinggi	Sangat	Mudah	-	9	9 16		16
XX	Provinsi Bangka Belitung	Rendah	Rendah	Sangat	Sulit	00		13		13
17	Kabupaten Bangka	Tinggi	Tinggi	Sangat	Mudah	00		15	15 236	
12	Kabupaten Belitung	Tinggi	Tinggi	Sangat	Sulit	00		14	14 221	
60	Kota Pangkal Pinang	Tinggi	Sedang	Sedang	Mudah	8		in the Control of the	15 236	
+	Kabupaten Bangka Selatan	Sedang	Rendah	Rendah	Sulft	7		13	13 202	2 3
<u>tn</u>	Kabupaten Bangka Tengah	Sedang	Sedang	Sangat Rendah	Mudah	00		14	14 219	
9	Kabupaten Bangka Barat	Sedang	Rendah	Sangat	Mudah	3		13	13 212	
7	Kabupaten Belitung Timur	Sedang	Rendah	Sangat	Sulf	~1		12	12 197	
×X	Provinsi Gorontalo	Rendah	Rendah	Sangat	Sedang	9		13	13 288	50
peri	Kabupaten Boalemo	Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	7		12	12 193	
13	Kabupaten Gorontalo	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sedang	00		· 14	14 227	
60	Kota Gorontalo	Rendah	Tinggi	Sedang	Mudah	00		14		
+	Kabupaten Pohuwato	Tinggi	Sedang	Rendah	Sulit	7		13		
CH.	Kabupaten Bone Bolango	Sedang	Rendah	Sangat	Sedang	7		13	13	

7	0	cn	4	G#	10	1	XX	7	ō	tut.	4	- 69	N	-	××	2	(1)		No	
Kabupaten Teluk	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten Raja Ampat	Kota Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Fak Fak	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Bintan	Kabupaten Lingga	Kota Tanjung Pinang	Kota Batam	Kabupaten Karimun	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten Natuna	Provinsi Kepulauan Riau	Kabupaten Gorontalo Utara	(2)		Nama Daerah	
Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	(3)	Kategori Realisasi Investasi		
Rendah	Rendah	Renduh	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	(4)	Kategori Jumlah Pelaku Usaha	Klasifik	
Tinggi	Sangat Rendah	Sedang	Sangat	Sangat Rendah	Sangat	Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Rendah	Sedang	Sangat	Sangat Rendah	Rendah	Sangat	Sangat	Sangat	(5)	Kategori Kapasitas Finkal	Klasifikasi Kategori	
Sediing	Sedang	Sedang	Mudah	Sulit	Mudah	Sult	Sulit	Sulit	Sulit	Sulft	Mudah	Sult	Sulit	Sult	Sulit	Sedang	(6)	Kategori Aksesibilitas Geografis		
7	7	7	90	7	7	7	80	90	7	00	9	95	7	7	9	7	(7)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha	
12	12	13	14	12	13	12	12	14	12	14	16	14	15	12	14	13	(8)	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	Pengawasan Penanaman Modal	Target Minimal O
197	191	208	215	193	208	189	265	221	195	215	253	221	195	197	304	208	(9)	Output (Pelaku Usaha)	Bimbingan Teknis Pelaku Usaha	inimal Output Kegiatan
1.5	8	*				*	300.000.000		35		1,5	2 .10		25	200.000.000		(10)	Alokasi Provinsi	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	ciatan
	8				,		1	,		-		·	*		1		(11)	Output (Video Promosi Digital)	ahan Promosi an Modal	
341.257,000	383.914.000	383.914,000	402.873.000	421.832,000	388.654.000	393,394,000	909.482.000	417.092.000	379,175,000	402.873.000	383.914.000	455,010,000	379.175.000	402.873.000	976.030.000	402.873.000	(12)	Modal	DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman	

	Kategori Jumlah Realisasi Pelaku Investasi Usaha	(1) (2) (3) (4)	8 Kabupaten Teluk Rendah Rendah	Wondama	Wondama Kabupaten Kaimana Rendah	Wondama  Kabupaten Kaimana Rendah  Kabupaten Maybrat Rendah	Wondama Kabupaten Kaimana Rendah Kabupaten Maybist Rendah Kabupaten Tambrauw Rendah	Wondama Kabupaten Kaimana Rendah Kabupaten Maybiat Rendah Kabupaten Tambrauw Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Selatan	Wondama Kabupaten Kaimana Rendah O Kabupaten Maybrat Rendah I Kabupaten Tambrauw Rendah 2 Kabupaten Manokwari Rendah Selatan Rabupaten Rendah Rendah	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah C Kabupa ten Maybrat Rendah Kabupa ten Tambra uw Rendah Kabupa ten Tambra uw Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah	Wondana Kabupaten Kaimana Rendah Kabupaten Tambrauw Rendah Kabupaten Tambrauw Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Kabupaten Selatan Kabupaten Pegunungan Arfak Rendah Rendah Kabupaten Majene Rendah Kabupaten Majene	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah C Kabupa ten Maybrat Rendah Kabupa ten Tambra uw Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Kabupa ten Rendah Pegunungan Arfak  Provinsi Sulawesi Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah Kabupa ten Tambrauw Rendah Kabupa ten Tambrauw Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Kabupa ten Manokwari Rendah Pegunungan Arfak  X Provinsi Sulawesi Rendah II Barat Kabupa ten Majene Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Polewali Rendah	Wondama Kabupaten Kaimana Rendah Kabupaten Maybiat Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Kabupaten Manokwari Rendah Kabupaten Mariak Pegunungan Ariak Rendah Kabupaten Majene Rendah Kabupaten Mamuju Rendah Kabupaten Mamasa Rendah Kabupaten Mamasa Rendah	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah Kabupa ten Maybrat Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Kabupa ten Manokwari Rendah Pegunungan Arfak Rendah Kabupa ten Majene Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Polewali Rendah Kabupa ten Mamasa Rendah	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah Kabupa ten Tambrauw Rendah Kabupa ten Tambrauw Rendah Kabupa ten Tambrauw Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Selatan Kabupa ten Manokwari Rendah Pegunungan Arfak  Rendah Rendah Kabupa ten Majene Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Mamasa Rendah Kabupa ten Mamuju Sedang Kabupa ten Mamuju Sedang	Wondama Kabupa ten Kaimana Rendah Kabupa ten Maybrat Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Kabupa ten Manokwari Rendah Pegunungan Arfak Provinsi Sulawesi Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Mamuju Rendah Kabupa ten Mamasa Rendah
Klasifikasi Kategori	Kategori Kapasitas Aksesibilitas Fiskal Geografis	(5) (6)	Rendah Sedang		SE .			S S DIE		<b>.</b>							
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan	200	(7)	7	7	7		e	6 :	0 0 0	<b>vo</b>	-1 <b>10</b> 0 0 0	71 74 <b>10</b> 05 05 05	7 7 7 0 0 0 0	5 7 7 7 <b>9</b> 5 5 6	2 5 2 7 2 8 0 0 0 C	7 7 5 7 7 7 <b>0</b> 5 5 6	80 71 72 73 74 74 80 60 60 C
Target Minimal O Pengawasan Bim Pengawasan Tekni Modal U	Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)	(8)	12	13	12	10	i	12 1	E 5	13	12 13 11 12	12 13 11 12 12	12 12 13	12 13 14 15 16 17	13 12 12 13 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	13 13 13 13 13	13 13 12 12 12 13
inimal Output Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaku Pen Usaha	Output (Pelaku Usaha)	(9)	189	199	193	184	184	( - 1) ( - 1)	178	178	178 288	178 288 193	178 288 193 197	178 288 193 197 197	178 288 193 197 197 197	178 288 193 197 197 197	178 288 193 197 197 191 187 212
latan Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Alokasi Provinsi	(10)		*	10	24.		,		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
han Promosi 1 Modal	Output (Video Promosi Digital)	(11)	,	*	,					1							
DAK Nonfisik Fasilitasi	Modal	(12)	360.216,000	364.955,000	350.736,000	369,695,000	369 695 000	100 mm	388,654,000	388.654.000 865.117.000	388,654,000 <b>865,117,000</b> 369,695,000	388.654.000 865.117.000 369.695.000 393.394.000	388.654.000 <b>865.117.000</b> 369.695,000 393.394.000 379.175.000	388,654,000 <b>865,117,000</b> 369,695,000 393,394,000 379,175,000 388,654,000	388.654.000 865.117.000 369.695.000 393.394.000 388.654.000 393.394.000	388.654.000 865.117.000 369.695.000 393.394.000 379.175.000 388.654.000 393.394.000 393.394.000	388.654.000  865.117.000  369.695.000  393.394.000  379.175.000  388.654.000  383.394.000  383.394.000  887.300.000

No.

Nama Daerah

Klasifikasi Kategori

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaku Usaha

> Pengawasan Penanaman Modal

Bimbingan Teknis Pelaku Usaha

> Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal

DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Target Minimal Output Kegiatan

Kategori Realisasi Investasi

Kategori Aksesibilitas Geografis

Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)

Output (Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha)

> Output (Pelaku Usaha)

> Alokasi Provinsi

Output (Video Promosi Digital)

Kabupaten Malinau

Sedang

(3)

Rendah

Sedang

Sulf

(5)

6

Kota Tarakan

Rendah

Tinggi

Rendah

Mudah

Renduh

Sangat

SILL

12

193

402,873,000

417.092.000

7

221

202

(9

(10)

383.914.000

Kabupaten Tana Tidung

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

UNIT ESELON / SATKER :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
KEGIATAN :
KELUARAN (OUTPUT) :

ALOKASI DANA : TAHUN ANGGARAN :

## ANAK LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2021

ENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT RAB PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

***			KODE	
1			DE	
Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan			URAIAN KEGIATAN	
	jml	S	00	
	satuan	22		
	×	88		
	jml	KOE		
	satuan	FISIEN	RINCIA	
	×	88	N PE	
	jml	80	RHI	
	satuan	2	TUNGAN	
	Jml	IML		
	Satuan	/SATUAN		
		HARGA	87	
	00 .		HVIWUL	

B. FORMAT RAB BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA

OPD:
UNIT ESELON/SATKER:
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:
KEGIATAN:
KELUARAN (OUTPUT):
ALOKASI DANA:
TAHUN ANGGARAN:

Moderator, dan Narasumber) - Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta)	Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Penginapan (Panitia, Pembawa Acara,	Fullday/Halfday (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber) - Uang Saku/Harian (Panitia,	A.4. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: - Luar Kota (Khusus Provinsi) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	A.3. Video Conference Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19 - Akun Video Conference
ORG	ORG	ORG	ORG	AKUN ×
×	×	×	×	×
HARI	HARI	HARI	HARI	TAHUN
×	×	×	×	
KALI	KALI	KALI	KALI	2.0
НО	НО	НО	OH	АК/ТН
-				Ĥ
				<del></del>

		þ.			KODE				
Moderator, dan Narasumber) - Uang Saku/Harian (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)	- Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Paket Meeting Fullday/Halfday (Peserta, Panitia, Pembawa Acara,	A.5. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Section Control Section Control		URAIAN KEGIATAN	Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber	- Biaya Suxab Antigen	- Spanduk dan Backdrop	- Penggandaan Bahan dan
0	6	100	jml sa			0	0	_	0
ORG	org		satuan			ORG	ORG	PKT	ORG
×	×	8	×			×	×	×	×
		15	ml s	KOEI					
HARI	HARI		jml satuan	KOEFISIEN	RINC	JAM	KALI	KEG	PAKET
×	×	-5	×	5	I NAI	×			×
			jml		ERH				
KALI	KALI		satuan		RINCIAN PERHITUNGAN	KALI			KALL
<u>-</u>			Jml	JML	4				
НО	НО	8	Satuan	JML/SATUAN	+	5	OK	PK	OP
				HARGA					
					HAIMUL				

Seminar Kit - Spanduk dan backdrop - Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator, Narasumber, dan Peserta) - Biaya Suab Antigen.  Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber  Denbawa Acara, Moderator, ORG x KALI  Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, ORG x JAM x KALI  Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  B.1. Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  B.1. Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  B.1. Rapat Persiapan dan Evaluasi Bimbingan ORG x KEG  Cordinar Berusaha Berbasis Risiko  Belanja Bahan - Konsumsi Makan ORG x KEG ORG x KEG
X KEG X HARI X X KALI X JAM X X KEG X KEG X KEG
KEG HARI X  KALI  KEG  KEG  KEG
KEG HARI X  KALI  KEG KEG KEG
KALI
OK OK OK OK

- 42		TEKNIS	MBINGAN	RAN BIA	JUMLAH ANGGARAN BIMBINGAN TEKNIS	TWIL
100	100		4	JUMLAH		
OJ.	KALI	×	JAM	×	ORG	Belanja Jasa Profesi - Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber
OK			KALI		ORG	- Biaya Swab Antigen
PK	KALI	×	HARI	×	PAKET	- Spanduk dan backdrop
OP		ASIE:	PAKET	×	ORG	- Penggandaan Bahan dan
ОН	KALI	×	HARI	×	ORG	- Uang Transportasi (Panitia, Pembawa Acara, Moderator,
HO	KALI	×	HARI	×	ORG	<ul> <li>- Uang Saku/Harian (Panitia,</li> <li>- Pembawa Acara, Moderator,</li> <li>dan Narasumber)</li> </ul>
						Fullday/Halfday (Peserta, Panitia, Pembawa Acara, Moderator, dan Narasumber)
НО	KALI	×	HARI	×	ORG	- Paket Meeting
12 E						- Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
						Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:

C. FORMAT RAB PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA

OPD:
UNIT ESELON/SATKER:
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:
KEGIATAN:
KELUARAN (OUTPUT):
ALOKASI DANA:
TAHUN ANGGARAN:

Rapat Identii Perma Modal Belanj		KODE I
Kapat Persiapan dan Identifikasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal Belanja Bahan	Identifikasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal	IIBAIAN KECIATAN
	jml satuan	
	KOEFISIEN x jml satuan	D
	Setuen x jml	BINCIAN DEBUTINGAN
	satuan	MACONITTE
	Jml /S	1
	Jml Satuan	
	HARGA	25
		HA IMIII

- Days a succe magen	J	JUMLAH	I			On
And the second s	J	UMLAH				200
Penyelesaian Permasalahan						2
dan yang dihadapi Pelaku						
Usaha dalam merealisasikan						
kegiatan usahanya						
Rapat Penyelesaian						
Permasalahan dan						
Hambatan yang dihadapi						
Pelaku Usaha dalam						
merealisasikan kegiatan						
usahanya						
Belanja Perjalanan Dinas						
Paket Meeting Dalam Kota						
- Paket Meeting	ORG	×	HARI	×	KALI	ОН
Fullday/Halfday						
(Narasumber, Panitia,						
Peserta)						
- Uang Saku/Harian (Panitia	ORG	×	HARI	×	KALI	НО
dan Narasumber)	PAKET	×	KEG			PK
dan Narasumber) - Penggandaan Bahan	0.00	×	KALI			OK

OPD UNIT ESELON/SATKER PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .. .. .. D. FORMAT RAB PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

.00		Ó			KODE		
A HATMUL		Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mercalisasikan kegiatan usahanya Rapat Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mercalisasikan kegiatan usahanya Belanja Bahan - Konsumsi Snack - Penggandaan Bahan			URAIAN KEGIATAN		Belanja Jasa Profesi Narasumber
NO:CA		5.00	jml				
RAN DE	ے	ORG ORG PAKET	satuan x			٠	ORG
NVF	HATMUL	× × ×	×			JUMLAH	×
JUMLAH ANGGARAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN	HA		jml	KOE		AH	
		KEG KEG	jml satuan x	KOEFISIEN	RINCI		JAM
RMA					AN P		×
A I A			Jml		ERH		
NAH			jml satuan		RINCIAN PERHITUNGAN		KALI
			Jml	JML	2		
	ľ	OK OK	Satuan	JML/SATUAN		3	2
				HARGA			
					JUMLAH		

																					>	>		KODE					
- Penginanan	- Tiket Pesawat	<ul> <li>Uang Transportasi</li> </ul>	<ul> <li>Crew Set Up Equipment</li> </ul>	Subtitle	- Translator Interview &	- Drone Pilot	- Gaffer	- Creative	<ul> <li>Assistant Videographer</li> </ul>	<ul> <li>Vide ographer</li> </ul>	- Director	- Producer	Produksi	- Biaya Suxib Antigen	Pendukung saat Rapat	<ul> <li>Konsumsi Snack</li> </ul>	<ul> <li>Konsumsi Makan</li> </ul>	storyline dan storyboard	Rapat Koordinasi Pembuatan	Pra Produksi	Belanja Jasa Lainnya	Designation of Delicar Decision		URAIAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	ALOKASI DANA	KELUARAN (OUTPUT)	KEGIATAN	
																						jml	8	Carr	**			22	
ORG	ORG	ORG	ORG		ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG	ORG		ORG		ORG	ORG					satuan							
×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×		×		×	×					×							
																						jml	KOEF						
HARI	KALI	KALL	HARI		HARI	HARI	HARI	HARI	HARI	HARI	HARI	HARI		KALL		KALI	KALL					satuan	KOEFISIEN	RINCL					
																						×	8	N PE					
																						jml		RHITU					
																						satuan		RINCIAN PERHITUNGAN					
																						Jml	JMI						
НО	OK	OK	НО		НО	НО	НО	НО	НО	ОН	НО	НО	Y .	OK		OK	OK					Satuan	JML/SATUAN						
																						8	HARGA						
																								HVTWDF					

www.peraturan.go.id

-			KODE	1																
Rapat Evaluasi Pembahasan Video Promosi - Konsumsi Makan			URAIAN KEGIATAN		- Voice over talent	<ul> <li>Additional Revision</li> </ul>	<ul> <li>Additional Editing Output</li> </ul>	<ul> <li>Music compose &amp; mixing</li> </ul>	<ul> <li>Motion graphic</li> </ul>	<ul> <li>Online editing &amp; Color</li> </ul>	<ul> <li>- Offline editing</li> </ul>	-Lighting dan aksesoris	-Stabilizer	- Clip on	- Tripod	- Lensa kamera	- Kamera	Equipment	- Biaya Suxab Antigen	- Uang Harian
	jml		. 0																	
ORG	satuan				VID	KALI	VID	VID	VID	VID	VID	ORG	BUAH	BUAH	BUAH	BUAH	BUAH		ORG	ORG
×	×											×	×	×	×	×	×		×	×
	jml	KOEF																		
KALI	satuan	KOEFISIEN	RINCL									HARI	HARI	HARI	HARI	HARI	HARI		KALI	HARI
	x jml		AN PER																	
	ıl satuan		RINCIAN PERHITUNGAN																	
· · · · ·	Jml	JM																		
OK	Satuan	JML/SATUAN	400		VID	KALI	VID	VID	VID	VID	VID	НО	BH/HR	BH/HR	BH/HR	BH/HR	BH/HR		OK	НО
		HARGA	A																	
			HATMUL																	

JUMLAH ANGGARAN PENYUSUNAN BAHAN PROMOSI

MENTERI INVESTASI/

REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Konsumsi Snack Pendukung saat Rapat - Biaya Swab Antigen ORG ORG JUMLAH KALI KALI OK OK

BAHLIL LAHADALIA

ttd

ANAK LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2022

## LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL

## TAHUN ANGGARAN 2022

Provinsi/Kabupaten/Kota: .....

A	В	9	C	D
	18	Perene	canaan	Pagu APBN (Rp)
NO	Kegiatan		Penerima t/ <i>Output</i>	-
		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5
1	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
2	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
3	Menu Kegiatan a. sub menu kegiatan b. sub menu kegiatan c. sub menu kegiatan			
	Total	ò		
	Pagu APBN			

Tempat	(6),	tanggal	(7)	

(Tanda tangan asli dan cap dinas) (8)

Pejabat Penandatangan

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1.	Nomor urut.
2.	Nama kegiatan atau sub kegiatan.
3.	Jumlah Penerima Manfaat/Output.
4.	Jumlah Satuan Penerima Manfaat/Output.
5	Jumlah Pagu APBN dalam Rupiah.
6.	Nama Kota provinsi/kabupaten/kota.
7.	Tanggal ditandatangani Laporan Rencana Penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
8.	Tandatangan asli dan cap DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
9.	Nama Penandatangan Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
10.	NIP Pejabat DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA

ON

## ANAK LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI INVESTASI/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021

ENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2022

# LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....(1) SAMPAI DENGAN TAHAP ..... (2a) TAHUN .....(2b)

				Pengaw	I. Ana	2. Ins	3. Evs		Per	Per Bimbin	Bimbin 1. Bin
				asan Pen	disa dan	<ol> <li>Inspeksi Lapangan</li> </ol>	luasi p	zinan Be		gan Tekni	gan Tekni bingan
Jenis I			3	Pengawasan Penamaman Modal	verifikasi	megne	enilaian	rusaha Pa	s kepada	- The state of the	Teknis/
Jenis Kegiatan			2.	lodal	Analisa dan verifikasi data, profil		kepatuhan	Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Bimbingan Teknis/Sosialisasi
					Analisa dan verifikasi data, profil dan informasi		Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan	aha	3		Implementasi
Per	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah	3.				33	Š			
Perencamaan	dah rima faat	Satuan	4,		300		50	ńć.	A I		
1	Pagu APBN	Rp	5.				92	C)	5	7	
:##	Jumlah Penerima Manfaat	dalmul	6.	0.00000	8		30	8	0	0	
	ilah rima faat	nentes	.7		60		60	30	8	9	
Pelaks	Realisasi Penggunaan	Rp	8.		9		20	8	8	7	
Pelaksanaan	Persentase Output	%	.6					63			
	Kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis	Ya	10.								
<3.98	antara dengan Teknis	Tidak	11,					2			
Permasalahan	Kodefikasi Masalah		12.				3		0 1		

	V			- 0	Ш.	
	Per	ç.	2.	1.	dih usa	12
Penyediaan Video Promosi Digital sebagai Bahan     Promosi Penanaman Modal	Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal	Evaluasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Penyelesalan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan keglatan usahanya	ldentifikasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
	3		1	1	2 88	
- 0	-	× ×	. 0			
	3	3 8	x 22	: 0		
5 88	- 3	? <u>\$</u>	E &			
2 32	9	s s	9 33			

Tempat ....<sup>(3)</sup>, tanggal .....<sup>(4)</sup>
Mengetahui,
Kepala OPD Teknis ...<sup>(3)</sup>
(Tanda tangan dan stempeh<sup>(3)</sup>

## PETUNJUK PENGISIAN

No.	URAIAN
1	Diisi sesuai dengan nama kabupaten/kota.
2 a-b	Diisi sesuai dengan tahap periode laporan dan tahun anggaran yang dilaporkan.
Kolom 1	Diisi dengan Nomor.
Kolom 2	Diisi jenis kegiatan dalam lingkup DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, yang terdiri dari:  I. Pengawasan Penanaman Modal II. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha III. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya IV. Penyusunan Bahan Promosi Penanaman Modal.
Kolom 3	Diisi jumlah target (perencanaan) penerima manfaat pada masing- masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 4	Diisi satuan target (perencanaan) penerima manfaat pada masing- masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 5	Diisi jumlah total pagu anggaran per masing-masing Jenis kegiatan berdasarkan alokasi tahun berkenan.
Kolom 6	Diisi jumlah target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 7	Diisi satuan target (yang telah dilaksanakan sampai dengan periode pelaporan) penerima manfaat pada masing-masing jenis kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal.
Kolom 8	Diisi jumlah realisasi penggunaan Dana BOKB per masing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan.
Kolom 9	Diisi persentase output yang merupakan perbandingan antara realisasi penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modalpermasing-masing jenis kegiatan sampai dengan periode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasi (kolom 5)
Kolom	
10-11	Diisi kesesuaian antara DPA SKPD dengan Petunjuk Teknis.
Kolom 12	Diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang terkait dengan menuliskan kode masalah yang tersedia. Kodefikasi Masalah:  1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).  2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis.  3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.  4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD  5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan

Kontrak.  7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelol.  8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.  9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontra	а.
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D.	B.,
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksangan Pekerjaan Kontra	
5. I CHIMBOMONIANI CERCAT CENGANIANI I CRESIONI ROTTE	ık
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swak	elola.
<ol> <li>Diisi tempat dibuatnya laporan.</li> </ol>	
<ol> <li>Diisi tanggal dibuatnya laporan.</li> </ol>	
<ol> <li>Diisi nama jabatan.</li> </ol>	
<ol> <li>Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.</li> </ol>	
<ol> <li>Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.</li> </ol>	

## FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL

## LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAK NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)TAHUN ANGGARAN ... (2) SAMPAI DENGAN TAHAP ... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini ... 4 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal

A. Sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya: Rp <sup>(5)</sup>

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I : Rp (6)
- Tahap II : Rp (7)

Total Penerimaan dari RKUN : Rp (8) = (6)+(7)

Jumlah A+B : Rp (9) = (5)+(8)

C. Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal melalui SP2D provinsi/kabupaten/kota

- Tahap I : Rp (10)

- Tahap II : Rp (11)

- Kumulatif s.d. Tahap ini : Rp (12) = (10)+(11)

- Pengembalian ke RKUD : Rp (13)

- Realisasi Penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi : Rp (14) = (12)-(13) Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke

RKUD

D. Persentase penyaluran : Rp (15) = (14) / (9)

E. Sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD : Rp (16) - (9)-(14)

s.d. Tahap ini

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...(17), Tanggal (18) Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan<sup>(19)</sup>

(tanda tangan asli dan stempel basah) (20)

Nama\_\_\_\_(21) NIP \_\_\_\_\_

## PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tahap I.
	Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tahap II.
	Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa Dana DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.

NO.	URAIAN	
19.	Diisi nama jabatan.	
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.	
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan.	

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHLIL LAHADALIA